

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Peluncuran Gagasan dan Konsep Koperasi Pedesaan

Dalam bagian ini akan dipaparkan berturut-turut mengenai gagasan dan konsep dasar koperasi pedesaan, upaya memasyarakatkan gagasan dan konsep tersebut, yang meliputi sumber informasi serta metode dan teknik penyampaiannya, citra negatif koperasi dan sikap skeptis masyarakat, kemudian mengenai persepsi, sikap dan tanggapan pemimpin puncak lokal (local top leader) yang meliputi ciri kepribadian dan kepemimpinannya, serta keputusan adopsi inovasi yang dilakukannya.

1. Gagasan dan Konsep Dasar Koperasi Pedesaan

Gagasan dan konsep dasar koperasi pedesaan bermula dari konsep tentang Unit Desa. Sebagaimana diketahui masalah kekurangan bahan makanan yang dihasilkan di dalam negeri hingga dasawarsa tujuh puluhan masih jauh dari pada mencukupi kebutuhan penduduk yang senantiasa bertambah dengan cepat. Hingga pada saat itu Indonesia dikenal sebagai negara pengimpor beras terbesar di dunia.

Dalam rangka usaha mencukupi kebutuhan bahan pangan secara nasional tersebut, maka pemerintah melakukan berbagai upaya di bidang pertanian. Salah satu di antara berbagai upaya tersebut ialah Bimbingan Massal Swa

Sembada Bahan Makanan (Bimas SSBM) yang digalakkan semenjak tahun 1962. Melalui program tersebut diperkenalkan kepada para petani mengenai teknik pertanian baru yang merupakan usaha intensifikasi pertanian yang meliputi 1) pengolahan tanah yang baik, 2) pengairan yang baik, 3) penggunaan bibit unggul, 4) penggunaan pupuk yang tepat dan 5) pemberantasan hama.

Dampak dari program tersebut ialah meningkatnya produksi pertanian pangan secara menyakinkan, sehingga pelaksanaannya semakin disempurnakan dengan pelaksanaan program yang disebut Bimas yang disempurnakan.

Kenaikan produksi pertanian itu kemudian menimbulkan masalah baru. Kenaikan produksi pertanian tersebut ternyata tidak dengan sendirinya diikuti dengan kenaikan tingkat pendapatan petani secara berarti. Hal ini dipandang dapat membawa akibat negatif. Oleh karena itu, masalah utama yang dipikirkan kemudian, ialah bagaimana mengamankan dan memanfaatkan kenaikan produksi itu dengan memperhatikan kepentingan petani. Dari latar belakang pemikiran itu lahirlah konsep Unit Desa.

Unit Desa adalah suatu satuan wilayah yang diperkirakan meliputi kawasan seluas 600 sampai dengan 1000 ha areal persawahan dengan pengairan teknis. Dengan sistem wilayah Unit Desa tersebut dimaksudkan untuk memudahkan petani mendapatkan sarana produksi pertanian (saprota), bibit unggul serta kredit. Di kawasan wilayah

Unit Desa itu dilengkapi pula dengan fasilitas penyuluhan pertanian yang dilaksanakan oleh petugas Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL), fasilitas perkreditan yang dilaksanakan oleh BRI Unit Desa. Selain itu juga disediakan kios atau warung yang menyediakan sarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit, dan obat-obatan anti hama.

Untuk kepentingan pengelolaan dan pemasaran hasil produksi, maka dalam kaitannya dengan konsep Unit Desa tersebut dibentuklah kemudian Bahan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa (BUUD/KUD). Fungsi dan tugas awal dari lembaga BUUD/KUD tersebut ialah menangani masalah pengelolaan dan pemasaran hasil produksi pertanian. Kelak kemudian apabila keadaan telah memungkinkan, maka fungsi-fungsi yang semula dilaksanakan oleh Unit Desa, seperti fungsi penyuluhan, perkreditan, penyediaan saprotan, serta pengelolaan dan pemasaran hasil produksi dapat dilaksanakan oleh Koperasi Unit Desa (KUD). Dengan demikian BUUD/KUD merupakan lembaga peralihan KUD.

Berdasarkan gagasan dan konsep yang dipaparkan di atas, maka pada tahun 1973, oleh pemerintah diupayakan pembentukan BUUD/KUD di berbagai wilayah pedesaan. Desa Bontosunggu tidak terkecuali.

2. Upaya Memasyarakatkan Gagasan dan Konsep Koperasi Pedesaan

Pembentukan BUUD/KUD di berbagai desa di Sulawesi

Selatan di dasarkan atas Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selatan No. 147/SK/V/1973. Beberapa waktu sebelumnya diterbitkan Surat Keputusan tersebut, gagasan dan konsep koperasi pedesaan itu telah diinformasikan kepada para kepala desa, yang wilayahnya akan tercakup dalam rencana pembentukan BUUD/KUD.

a. Sumber Informasi dan Teknik Penyampaiannya

Bagi kepala-kepala desa yang merupakan pemimpin puncak lokal, sumber resmi informasi mengenai gagasan dan konsep tersebut ialah para pejabat birokrasi tingkat-atas desa. Para pejabat yang dimaksudkan ialah Bupati, Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten dan atau petugas penyuluhan perkoperasian dari instansi ini, serta pejabat atau petugas lain yang berkaitan.

Khusus bagi H. Palessei, kepala desa Bontosunggu sebagai pemimpin puncak lokal (local top leader) di desanya, informasi dan penjelasan mengenai gagasan dan konsep koperasi pedesaan itu, juga diperolehnya dari seorang kerabatnya. Kerabat tersebut, M. Yusuf Karim adalah seorang petugas teknis perkoperasian pada Kantor Departemen Koperasi (Kandepkop) di Bulukumba. Ia adalah kakak kandung H. Abdullah Karim, menantu kepala desa, H. Palessei. Karena hubungan kekerabatan tersebut maka mereka acapkali bertemu melalui sarana tradisi silaturrahi. Dalam kesempatan-kesempatan yang demikian, masalah koperasi dapat muncul sebagai topik perbincangan.

Biasanya berawal dari saling tanya mengenai keadaan kehidupan sehari-hari serta tugas pekerjaan masing-masing.

Penyampaian informasi mengenai gagasan dan konsep koperasi pedesaan tersebut dilakukan oleh para pejabat dan atau petugas dari perangkat birokrasi-atas desa, disamping kerabat seperti disebutkan di atas. Metode yang digunakan oleh para pejabat serta petugas tersebut umumnya adalah komunikasi formal dengan pendekatan verbal instruktif. Sedangkan cara atau teknik penyampaian pesan informasi yang lazim digunakan ialah ceramah yang kadang-kadang diselingi tanya-jawab dan kadang-kadang juga tidak.

Penyampaian informasi tersebut terutama menggunakan sarana pertemuan-pertemuan umum atau rapat dinas, seperti Rapat Desa, Rapat Koordinasi Pemerintah yang diselenggarakan, baik pada tingkat kecamatan maupun pada tingkat kabupaten. Demikian pula kunjungan kerja para pejabat dan atau petugas dari kabupaten ke desa, acapkali juga digunakan sebagai kesempatan menyampaikan penjelasan dan informasi tambahan, terutama apabila petugas yang bersangkutan memang dari instansi terkait.

Dalam pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat resmi yang digunakan sebagai ajang komunikasi informasi tersebut, dengan menggunakan metode komunikasi formal, biasanya digunakan teknik ceramah. Kadang-kadang teknik ceramah tersebut dilaksanakan dengan pemberian kesempatan

tanya-jawab sesudahnya.

Sesungguhnya dengan cara pendekatan yang demikian, biasanya kurang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya dialog-dialog yang seringkali dibutuhkan bagi pemahaman yang kritis pada pihak komunikan. Terhambatnya dialog dalam keadaan yang demikian adalah disebabkan adanya suasana formal berjenjang yang tidak setara, dengan acuan norma birokratik yang mengatur hubungan antarpersonal.

Di sisi lain "budaya diam" yang masih merupakan ciri sosial-psikologis masyarakat di Sulawesi Selatan terutama di pedesaan, dalam hubungan bawah atas, juga merupakan hambatan tersendiri untuk komunikasi dialogis.

b. Citra Negatif Koperasi dan Sikap Skeptis Masyarakat Sebagai Tantangan

Seperti halnya di daerah lain, di desa Bontosunggu juga citra koperasi tidaklah menggembirakan di masa-masa yang lalu. Masyarakat bersikap skeptis terhadap peluang atau kemungkinan koperasi memperoleh kemajuan dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan mereka.

Bahwa opini masyarakat telah diwarnai dengan citra negatif koperasi, digambarkan dengan ungkapan bahasa Bugis asenna mupa koperasi, ... kuperra'si", yang dulu pernah sempoat berkembang di kalangan masyarakat. Ungkapan yang bernada sinis tersebut jika diterjemahkan secara harfiah, berarti namanya saja pun sudah koperasi, ... kuperas lagi. Perkataan koperasi dalam bahasa

Indonesia dipadankan dengan perkataan kuperra'si dalam bahasa Bugis dengan bunyi yang mirip tetapi mempunyai arti yang sangat berbeda. Kuperra'si artinya kuperas lagi sedang koperasi adalah badan atau institusi kerjasama, kebersamaan dan solidaritas yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Dari mana asal mula timbulnya ungkapan tersebut tidak seorang pun yang tahu. Menurut kepala desa Bontosunggu, H. Palessei, kemungkinan sekali ungkapan tersebut timbul dan berkembang di daerah lain, kemudian menyebar ke mana-mana termasuk ke Bontosunggu. Besar kemungkinan di daerah lain rakyat pernah mendapatkan pengalaman yang tidak menggembirakan dalam melakukan transaksi dengan koperasi di masa-masa yang lalu. Sebagaimana diketahui pada tahun 1962, atas prakarsa pemerintah telah dibentuk Koperasi Produksi Pertanian (Koperta) di desa-desa, terutama di daerah penghasil utama padi yang tujuannya adalah meningkatkan produksi pangan serta mengelola dan menangani masalah pemasarannya.

Di Bontosunggu, menurut H. Palessei ungkapan itu sebenarnya tidak relevan karena Koperta tetap bekerja baik dalam batas-batas kemampuannya, hingga munculnya gagasan koperasi pedesaan model RUUD/KUD. Mesin "huller" yang sudah sejak lama tidak lagi berfungsi di desa-desa lain karena telah rusak, masih tetap bekerja di Bontosunggu, meskipun dapat dikatakan tanpa memperoleh

laba atau keuntungan yang berarti dari kegiatan melayani kebutuhan penggilingan gabah masyarakat.

Sejalan dengan gambaran atau citra koperasi yang negatif itu, dalam masyarakat juga terdapat sikap skeptis yang tampak telah berkembang secara laten dalam hubungan dengan organisasi dan usaha koperasi. Terhadap gagasan dan konsep koperasi yang diinformasikan akan dikembangkan di pedesaan, terdengar ungkapan yang mengatakan bara iyapa, yang artinya secara harfiah, mungkin baru ini. Maksudnya ialah bahwa jika ada koperasi yang dapat berhasil dan berkembang, boleh jadi baru kali ini, tapi rasa-rasanya tidak akan mungkin ada koperasi yang demikian.

Opini dan sikap masyarakat yang demikian terhadap koperasi, sudah barang tentu tidak menguntungkan terhadap gagasan dan konsep pengembangan gerakan koperasi. Apabila dikehendaki mengembangkan suatu gerakan koperasi, maka masalah utamanya ialah bagaimana mengubah sikap dan pandangan negatif tersebut. Sebab tanpa perubahan sikap masyarakat yang demikian, maka partisipasi dan dukungan mereka tidak akan diperoleh. Sedangkan suatu kegiatan atau usaha pembangunan masyarakat tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat, tidaklah akan berlangsung efektif. Ada dugaan dari H. Palessesi bahwa ungkapan yang memberi gambaran jelek dan menyebabkan sikap skeptis dan pesimis terhadap koperasi tersebut sengaja diciptakan oleh para

tengkulak. Tujuannya ialah untuk menghindari kemungkinan akan mendapat saingan dari koperasi.

3. Persepsi, Sikap, dan Tanggapan Pemimpin Puncak Lokal

Ketika H. Palessei, pemimpin puncak lokal (local top leader) desa Bontosunggu mendengar pertama kali tentang gagasan dan konsep koperasi pedesaan versi baru yang diinformasikan pada suatu pertemuan resmi, dia tidak merasakan sesuatu yang khusus yang perlu dipikirkannya. Berbagai konsep serta program pedesaan telah silih berganti diaplikasikan semenjak masa baktinya, yang kini telah memasuki dasawarsa yang keempat. Semuanya telah berlangsung dan berlalu tanpa ada suatu masalah khusus yang dapat dipandang mengganggu.

Akan tetapi setelah beberapa kali mendapatkan informasi dan penjelasan, mengenai gagasan dan konsep koperasi pedesaan yang baru, yang akan diprogramkan secara nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat petani di pedesaan, yang kelak diharapkan akan dikelola dan dikembangkan dari, oleh dan untuk masyarakat pedesaan sendiri, ia baru merasa perlu menaruh perhatian khusus.

Ia mulai mencari penjelasan yang lebih banyak melalui M. Yusuf Karim dengan cara komunikasi informal yang lebih dialogis. Sebagaimana telah disebutkan terdahulu, Yusuf Karim adalah seorang petugas teknik pada Kandepkop Bulukumba, dan kakak kandung Abdullah Karim,

menantu H. Palessei. Hubungan kekerabatan di antara mereka mendasari adanya saling kunjung silaturahmi. Tradisi silaturahmi itu acapkali digunakan H. Palessei memperbincangkan masalah koperasi dan prospeknya di pedesaan.

Untuk memahami lebih lanjut mengenai persepsi, sikap, dan tanggapan kepala desa, H. Palessei, berkenaan dengan pengembangan gerakan koperasi pedesaan itu, perlu dipahami karakteristik kepribadian serta ciri kepemimpinannya dengan menengok beberapa episode dalam perjalanan hidupnya, kemudian juga memahami keputusan adopsi inovasi yang dilakukannya.

a. Karakteristik Kepribadian dan Kepemimpinan
H. Palessei

Dari berbagai informasi diperoleh keterangan bahwa tingkat pendidikan formal yang pernah ditempuhnya hanya sampai tingkat SD. Akan tetapi, dalam catatan resmi di kantor desa dan koperasi disebutkan pendidikannya setingkat SLTA.

Usianya pada saat penelitian ini tercatat 63 tahun. Jabatan kepala desa telah dipegangnya lebih dari 30 tahun terus-menerus tanpa terputus.

Statusnya serta peranannya sebagai pemimpin puncak lokal, yang tidak pernah terputus selama jangka waktu sekian lama tersebut, merupakan salah satu faktor yang menjadikan dirinya tidak dapat dipisahkan dari dinamika

perkembangan masyarakat desa Bontosunggu.

Warga desa sebayanya mengenalnya semasih pemuda, sebagai seorang yang sopan santun, rendah hati, berani dan jujur serta memiliki rasa solidaritas sosial yang tinggi. Semasa sebagai pemuda lanjang itu ia memang dekat dengan pimpinan dan pamong desa saat itu, karena ia suka membantu pekerjaan apa saja dari para pamong tersebut. Agaknya karena itu pula ia pernah direkrut oleh "Karaeng Kacamata", Andi Sultan Daeng Raja, sebagai ajudan. Andi Sultan waktu itu adalah kepala pemerintahan swapraja Bulukumba.

Bagi warga desa Bontosunggu yang pernah merasakan kepahitan hidup pada masa-masa pergolakan dan kekacauan, yakni pada masa pemberontakan Abdul Kahar Muzakkar dalam dasawarsa 50-an dan 60-an, Palessei merupakan tokoh legendaris. Berbagai peristiwa berdarah akibat konflik bersenjata antara TNI dan DI/TII, menyebabkan ia sangat dikenal keberaniannya. Ceritera mengenai keberaniannya dalam keterlibatannya di berbagai konflik bersenjata tersebut, hingga saat penelitian ini masih dapat diperoleh dengan mudah di Bontosunggu khususnya dan di Gangking dan Bulukumba umumnya, terutama di kalangan orang-orang sebayanya dan pernah mengalami kehidupan di masa kekacauan tersebut. Acapkali ceritera mengenai keberanian H. Palessei itu dihubung-hubungkan dengan hal-hal yang tidak rasional.

Menurut penuturan beberapa orang warga desa Bontosunggu, di Bontosunggu dan di Bulukumba, ia memiliki paddissengeng kebbeng (ilmu kebal) dan paddissengeng pappasala (ilmu tolak bala). Konon dengan ilmu kebal itu, ia tidak mempan oleh senjata api maupun senjata tajam. Sedangkan dengan ilmu penolak bala tersebut, ia selalu luput dari sasaran peluru, meskipun dengan sengaja senjata dibidikkan ke padanya oleh musuh.

Pada suatu kesempatan berbincang-bincang dengan H. Palessei perihal mengenai ilmu kebbeng dan ilmu pappasala, sebagaimana dituturkan orang, ia tidak mengiyakan tetapi juga ia tidak menyangkalnya. Tanpa membenarkan atau menyangkal penuturan orang mengenai dirinya tersebut, justru ia malah menceritakan berbagai pengalamannya dalam berbagai peristiwa pertempuran antara TNI dan DI/TII dalam mana ia terlibat.

Dalam kesempatan yang lain ia menjelaskan bahwa sesungguhnya segala sesuatu adalah tergantung pada kuasa Allah. Siapa pun tidak akan cedera diterjang peluru dan sebaliknya siapapun juga akan tewas oleh peluru apabila sudah dikehendaki oleh Allah. Dengan demikian, kekebalan itu menurut dia bukanlah masalah ilmu, melainkan masalah keyakinan atas kemahakuasaan-Nya dan kepasrahan kita atasnya. Persoalannya ialah bagaimana seseorang bisa sampai kepada suatu keyakinan yang bulat bahwa pada suatu saat dan situasi yang dihadapinya, ia sedang berada dalam

lindungan Allah dan tindakannya dituntun oleh-Nya.

Mengenai ceritera orang bahwa ia tidak dapat menjadi sasaran peluru sekalipun tembakan diarahkan kepadanya, ia menjelaskan dengan sebuah pertanyaan, orang yang bagaimanakah sesungguhnya yang mudah menjadi mangsa peluru? Dijawabnya sendiri kemudian, yaitu orang yang tubuhnya berbau anyir. Pada hakekatnya peluru tertarik ke arah sesuatu atau seseorang yang berbau anyir. Berbuat aniaya adalah penyebab mengapa seseorang berbau anyir. Makin banyak seseorang berbuat aniaya dalam hidupnya, makin ia berbau anyir. Orang yang demikian itulah yang cepat atau mudah menjadi mangsa peluru dalam pertempuran.

Pantangan berbuat aniaya bagi orang yang tidak ingin mudah menjadi umpan peluru, bukan saja terhadap sesama orang yang masih hidup, akan tetapi juga kepada seseorang yang telah meninggal. Oleh karena itu, adalah pantangan juga mengambil sesuatu benda milik seseorang, kawan atau pun lawan yang mati di dalam suatu pertempuran. Mengambil barang milik seseorang yang telah menjadi mayat tersebut, adalah merupakan keserakahan dan kesewenang-wenangan terhadap orang yang sama sekali tidak berdaya lagi.

Petuah yang mendasari kepercayaan dan keyakinan yang demikian, diperoleh dari orang-orang tua terdahulu, yang diungkapkan dalam bahasa Bugis seperti berikut ini.

Aja mukeccai anunna taue. Nasaba narekko mpuji kkeccai aqa-aqanna taue, mukenynyekitu alemu. Narekko makenynyeko, nasappakotu pilurue.

Secara harfiah kalimat-kalimat tersebut di atas dapat diterjemahkan demikian: Jangan engkau mengganggu milik orang lain, sebab apabila engkau suka mengganggu kepunyaan atau milik orang lain, akan menyebabkan dirimu berbau anyir. Jika engkau berbau anyir, maka engkau akan dicari oleh peluru.

Pada masa "pemuda" (revolusi). Palessei telah aktif dan menjadi tokoh muda di desanya. Peranannya mula-mula hanya sebagai "informan" yang terpercaya oleh para pemuda pejuang bersenjata. Ketika masa berkecamuknya aksi pembalasan terhadap orang-orang dianggap pengkhianat karena pernah memihak Belanda, oleh para pejuang bersenjata tersebut, ia beberapa kali berhasil menyelamatkan nyawa seseorang terculik yang terancam akan menjalani eksekusi hukuman mati. Jika ia memberikan kesaksian bahwa seseorang terculik tidak dapat dikategorikan pengkhianat, maka ia akan dibebaskan. Terhadap orang yang demikian, Palessei menyuruhnya untuk segera meninggalkan Bulukumba ke daerah lain di luar Sulawesi Selatan. Ia melakukan hal demikian itu karena terdorong oleh rasa kemanusiaan. Tentu saja ia tidak akan berusaha melindungi orang yang memang telah dikenal secara luas oleh masyarakat sebagai pengkhianat.

Pada masa memuncaknya kekacauan, yakni sekitar

tahun 1955 sebagai akibat pemberontakan Kahar Muzakkar, banyak penduduk desa Bontosunggu yang pergi meninggalkan desanya. Sebagian mengungsi ke gunung sesuai anjuran atau perintah DI/TII, sebagian lagi pergi ke kota, bahkan ke luar wilayah Sulawesi. Palessai memilih masuk ke kota Bulukumba, dan beberapa waktu kemudian menggabungkan diri dalam kesatuan Hansip di antaranya yang terpilih dan disiapkan oleh TNI sebagai kesatuan tempur yang dipersenjatai.

Pilihannya menggabungkan diri dalam kesatuan tempur Hansip bersenjata, yang memang dimaksudkan untuk kegiatan-kegiatan operasi pengamanan itu, mendapat sorotan dan kritik dari berbagai kalangan kerabat keluarganya. "Bukankah orang meninggalkan desa dan mengungsi ke kota adalah untuk mencari perlindungan dan keselamatan?"

Tanggapannya terhadap komentar kerabat keluarganya tersebut diungkapkannya dalam kalimat bahasa Bugis berikut ini.

Ikotu elokmikko pole manre bembek, iya' elokka lao qqere'i bembek-e. Secara harfiah ungkapan tersebut dapat diterjemahkan: Engkau itu hanya mau datang untuk makan kambing, saya justru mau datang untuk menyembelih kambingnya. Makna yang dimaksudkan oleh ungkapan itu yang sebenarnya ialah bahwa apabila orang lain umumnya memilih hadir di saat pesta berlangsung, maka ia justru memilih ikut bekerja sekuat tenaga untuk mempersiapkan

pestantanya. Selanjutnya secara konstektual, makna pernyataan itu ialah bahwa apabila orang lain umumnya menghendaki kembali ke desanya apabila keadaan telah aman, maka ia jutru akan berjuang dan siap berkorban untuk membantu memulihkan keamanan yang dibutuhkan masyarakat.

Pandangan dan sikap hidup yang tercermin dari pernyataan tersebut, yang menjadi motif yang mendasari keputusan pilihannya turut memanggul senjata, mengungkapkan makna mengenai rasa tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial serta semangat dedikasi yang tinggi.

Perlu dikemukakan bahwa tugas-tugas operasi yang dibebankan kepadanya bersama pasukan yang dipimpinnya, semula hanya terbatas di kawasan desanya. Akan tetapi bukti keberhasilannya berkali-kali mengusir serangan gerombolan yang berkekuatan lebih besar, dan melindungi rakyat yang kembali menggarap sawahnya, maka wilayah tugasnya diperluas. Hampir seluruh wilayah kabupaten Bulukumba telah dijelajahinya bersama dengan ABRI untuk mengusir serangan atau gangguan gerombolan pemberontak DI/TII. Bersamaan dengan keberhasilan-keberhasilannya sebagaimana telah disebutkan, semenjak itu pula ia menjadi tokoh legendaris dalam hal keberanian. Di sisi lain hal itu juga mengungkapkan makna akan loyalitas dan semangat dedikasinya yang tinggi terhadap negara dan rakyatnya.

Pengalaman menjadi pallapi baro-baro Andi Sultan Daeng Raja, karaeng atau kepala pemerintahan wilayah

swapraja Bulukumba pada waktu itu, menunjukkan kualitas kepribadiannya sebagai orang terpercaya bagi pejabat atasannya dan bagi keamanan pemerintahannya. Pallapi baro-baro dapat diterjemahkan secara harfiah, yaitu alas atau pelindung dada. Maksudnya ialah ajudan atau pengawal pribadi.

Kedudukan terpercaya sebagai pengawal raja merefleksikan nilai kejujuran, keterpercayaan, loyalitas, dedikasi, dan keberanian. Semua itu menjadi credit point dirinya di mata masyarakat desanya, yang menjadikannya tokoh toriasiri.

Toriasiri, ialah seseorang yang orang lain masiri atau malu atau segan dan hormat kepadanya, sehingga cenderung dipatuhi. Karena orang lain masiri atau malu, segan, hormat, dan cenderung patuh kepadanya, maka pada hakikatnya tokoh toriasiri dapat diidentikkan dengan tokoh panutan.

Seseorang muncul sebagai tokoh toriasiri, adalah karena ia selalu konsisten berpijak pada nilai-nilai luhur. Keadaan yang demikian memang telah menjadi bagian dari riwayat kehidupan H. Palessei, sebagaimana telah dipaparkan terdahulu.

Kualitas lain yang menjadi ciri kepribadian H. Palessei adalah sifat rendah hati, kesahajaan, serta solidaritas. Sifat kerendah hatian dicerminkan dalam interaksi sosialnya. Prinsip hidup yang dianutnya, dalam

hal ini, dirumuskan dalam kalimat: Narekko tau napuji riandikeng, andikengngi, narekko tau napuji ripuangeng, puangengngi. Artinya jika seseorang suka disapa andi, sapaalah dia andi, jika seseorang suka disapa puang, sapaalah dia puang.

Sapaan andi dan puang itu lazimnya adalah sapaan terhadap keluarga raja atau kalangan bangsawan. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa sikap rendah hati adalah modal untuk mendapatkan simpati dari orang lain, sedangkan simpati orang merupakan salah satu modal mempengaruhi orang lain. Sifat kesahajaan dikaitkan dengan prinsip deto gaga tau tuo batu, elok manengmui taue mate, engngerrangtoi esso rimungie. Artinya, tidak ada orang yang akan hidup bagaikan batu, semua orang akan mati juga, karena itu ingat jugalah hari kemudian.

Sikap hidup bersahaja, selain tercermin dalam kehidupan sehari-hari, juga tampak dalam hal urusan pengakuan formal atas jasa-jasanya dalam perjuangan. Ia baru sekitar dua tahun menerima tunjangan pensiun sebagai veteran, sedangkan orang-orang lain, yang tidak banyak dikenal jasanya oleh masyarakat, telah mendapatkannya jauh lebih dulu. Tentang hal itu, ia memberi komentar: Padallao teppada upe. Artinya sama-sama berangkat, tetapi tidak sama peruntungan.

Kualitas kepribadian sebagaimana digambarkan di atas itu, yang banyak mewarnai peranannya dalam upaya

menggerakkan rakyatnya untuk berkoperasi sebagaimana yang akan dipaparkan kemudian.

Dalam hal kepemimpinan, pada dasarnya dia memiliki kapasitas sebagai pemimpin formal dan sekaligus pemimpin informal. Ia adalah pemimpin formal di desanya, dalam kedudukannya sebagai kepala desa yang merupakan pemimpin puncak di desanya. Kedudukan sebagai pemimpin puncak lokal tersebut telah dipangkunya lebih dari 30 tahun tanpa pernah terputus. Kedudukannya dalam jabatan tersebut sepanjang kurun waktu yang demikian lama memberi makna adanya penerimaan terhadap kepemimpinan yang diragakannya, baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah di tingkat atas desa.

Prinsip kepemimpinan yang dilaksanakannya didasarkan atas ada tongeng yang artinya kebenaran. Dalam konsep ada tongeng itu maka suatu pernyataan atau ucapan seseorang pemimpin, atau siapa pun juga yang mengaku beradab, membawa dampak keterikatan moral. Jika seorang pemimpin telah mengucapkan suatu pernyataan, misalnya, janji atau kesanggupan untuk sesuatu hal, maka ia wajib menunaikannya. Berkaitan dengan konsep ada tongeng itu ada ungkapan yang menyatakan : Naiya olokoloe tuluna riakkatenni, naiya taue adanna riakkatenni. Artinya, hewan ternak itu talinya yang dipegang, sedangkan pada manusia ucapan atau perkataannya yang dipegang. Dengan demikian, apabila seseorang,

terlebih lagi jika ia seorang pemimpin, mengucapkan suatu pernyataan, maka ia terikat secara moral untuk merealisasikan pernyataan tersebut.

Memimpin orang desa, katanya, mungkin berbeda dengan memimpin orang kota. Bagi kebanyakan orang desa, prinsip ada tongeng masih bersifat mengikat. Bagi orang desa, sekali saja seseorang mengingkari janji, maka akan sulit memulihkan kepercayaannya.

Baik dalam hal memimpin maupun dalam kehidupan sehari-hari ada tiga hal yang selalu menjadi pegangannya, yaitu madecengi atie, makessing ada-ada-e, makedsingi gau-e. Artinya, hati atau niat yang baik, lisan atau ucapan, dan tutur kata yang baik, dan tindakan atau prilaku yang baik.

Aktualisasi prinsip dan nilai-nilai yang menjadi acuan kepemimpinannya tersebut telah menjadikan dirinya lebih daripada semata-mata sebagai pemimpin formal tetapi juga sekaligus menampilkan citra sebagai pemimpin informal bagi warga desanya. Sebagai kepala pemerintahan desa, ia adalah pemimpin dalam arti formal. Dalam kapasitas sebagai kepala desa itu ia menjalankan fungsi sebagai perpanjangan perangkat birokrasi pusat atau atas desa. Akan tetapi dalam kapasitasnya sebagai toriasiri di desanya, ia adalah panutan bagi warga desanya. Sebagai tokoh panutan tersebut, ia sekaligus telah mengartikulasikan kecenderungan dan kepentingan rakyat.

Bagaimana ia mengartikulasikan kepentingan rakyat, dapat diidentifikasi dari dua kasus di antara berbagai kasus, yakni sebagaimana dikemukakan bertikut ini.

Pada tahun 1964-1965, ketika banyak pendatang baru yang bermaksud untuk bermukim di desa Bontosunggu, ia membiarkan para pendatang baru tersebut menggarap tanah-tanah negara yang memang belum digarap. Menurut pengakuannya, seandainya dia mau tentu dia dapat menguasai tanah-tanah tersebut kemudian menyewakannya kepada siapa yang mau menggarapnya, maksudnya bagi para pendatang tersebut.

Kasus lain ialah ketika ada rencana pemerintah membangun SMA, sedangkan tanah yang diperlukan sulit memperolehnya, ia merelakan sawahnya seluas dua hektar untuk keperluan itu dengan ganti rugi sewajarnya. Menurut perhitungan ia rugi secara ekonomis, karena lahan sawah tersebut mampu berproduksi dua kali dalam setahun. Setiap kali panen dapat dihasilkan antara 70-75 karung gabah yang berarti ia mempunyai peluang memperoleh uang sebanyak Rp 3.000.000,00 setahun untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Sedangkan dengan menyerahkannya untuk pembangunan sekolah itu, peluang tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi. Sementara uang ganti rugi dari pemerintah biasanya diperhitungkan minimal.

Dalam kapasitas sebagai panutan dan atau toriasiri itu, maka pada hakekatnya ia adalah pemimpin

informal. Dalam konteks inilah dapat dipahami makna kesetiaan dan kesediaan orang-orang di sekitarnya, yaitu kerabat keluarga dan para pamong desa khususnya, dan rakyat pada umumnya untuk selalu menyertai kegiatannya, sebagaimana misalnya dengan gerakan koperasi pedesaan yang dipelopornya. Bagaimana ia berperan menggerakkan warga di desanya untuk berkoperasi akan dipaparkan kemudian.

Kualitas lain dari kepribadian dan kepemimpinan H. Palessei ialah kemampuan menjalankan peranan sebagai opinion leader. Sebagai opinion leader (Rogers, 1969) ia mempunyai kecakapan mempengaruhi orang lain secara baik, informal dan ajeg. Tidak dapat disangkal bahwa kemampuannya mempengaruhi orang lain secara baik, informal dan ajeg itu, berkaitan erat dengan ciri kepribadiannya sebagaimana telah dipaparkan di atas. Juga kepemimpinannya yang berciri panutan, yang selalu mengacu kepada prinsip ada tonggeng, membuat orang lain cenderung untuk memperhatikan ajakannya dan memenuhi anjurannya. Kemampuan sebagai opinion leader tersebut merupakan pula salah satu modal atau aset yang penting baginya untuk mengajak dan menggerakkan warga desanya berkoperasi. Hal ini juga akan dipaparkan kemudian.

Dalam kaitan dengan gagasan dan konsep koperasi pedesaan yang diluncurkan sebagai suatu inovasi, Palessei dapat digolongkan sebagai seorang pengadopsi potensial. Sebagaimana diketahui, Roger menggolongkan individu

menjadi empat dalam hal kecepatannya menangani inovasi, yaitu : 1) Penemu (innovators), 2) pendahulu (early adopters), 3) mayoritas pendahulu (early majority), dan 5) yang tertinggal (laggards). Dalam suatu sistem sosial, penemu adalah orang yang membuat inovasi dan atau orang yang pertama-tama memilih atau memodifikasi inovasi dari suatu sistem sosial lain. Para penemu dan pendahulu itu disebut juga pengadopsi potensial. (Muhadjir, 1983 h. 18).

Sebagaimana diketahui gerakan koperasi yang sedang digalakkan di pedesaan di Indonesia saat ini, gagasan dan konsepnya merupakan suatu inovasi bagi masyarakat pedesaan itu sendiri, karena semula diintroduksikan ke dalam komunitas pedesaan oleh sumber di luar desa. Dan dalam hal kasus penelitian ini, kepala desa H. Palessei merupakan orang pertama yang memodifikasi inovasi tersebut, kemudian mentransformasikannya menjadi gerakan yang melibatkan komunitas desanya secara bertahap, bahkan kemudian menjangkau desa tetangganya.

b. Keputusan Adopsi Inovasi oleh Pemimpin Puncak Lokal

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, saat mula pertama ia mendapatkan informasi mengenai gagasan dan konsep koperasi pedesaan yang akan diaplikasikan, ia tidak menaruh perhatian khusus secara sungguh-sungguh. Hal ini disebabkan telah sering adanya berbagai program pedesaan yang diluncurkan. Sikapnya yang tidak atau kurang

bersungguh-sungguh itu, menyiratkan makna rutinitas yang dialami orang-orang desa dalam menanggapi program dari pemerintah.

Setelah berulang kali gagasan dan konsep mengenai koperasi itu didengarnya diinformasikan oleh komunikator yang berbeda, maka ia mulai menaruh perhatian khusus. Gambaran mengenai berbagai fasilitas yang akan menyertai program pengaplikasian gagasan dan konsep koperasi pedesaan baru tersebut, seperti penyuluhan, perkreditan, sarana produksi padi, jaminan pemasaran, merupakan hal-hal yang menarik perhatian dan pemikirannya. Dalam perkembangan selanjutnya, ia mulai mencari penjelasan melalui jalur komunikasi informal dan antarpersonal. Sumber informasi yang paling sering menjadi lawan berbincang-bincang dalam hal ini, ialah M. Yusuf Karim, kakak kandung menantunya, Abdullah Karim. Yusuf Karim, sebagaimana telah dikemukakan, adalah petugas teknis pada Kandepkop Bulukumba. Tradisi silaturahmi di antara sesama kerabat keluarga yang masih kuat dalam masyarakat desa, memungkinkan di antara mereka sering terjadi perjumpaan. Dalam kesempatan perjumpaan yang demikian, acapkali mereka memperbincangkan mengenai masalah gagasan dan konsep koperasi pedesaan versi baru itu. Dengan perkataan lain, tradisi silaturahmi dijadikan ajang proses komunikasi informal dan antarpersonal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran PLS, perkopersian

telah meningkat intensitasnya dialami oleh H. Palessei.

Proses yang terjadi sebelumnya dalam bentuk pertemuan-pertemuan formal dengan metode komunikasi formal dan dengan teknik ceramah yang mengandalkan pendekatan verbal-instruktif, pada dasarnya adalah juga dimaksudkan sebagai sarana pembelajaran. Bentuk kegiatan pembelajaran PLS yang demikian ditandai dengan ciri: deliberate, purposeful dan designated. Sedangkan proses yang terjadi melalui sarana silaturahmi, seperti disebutkan di atas merupakan bentuk kegiatan belajar PLS yang digolongkan natural societal setting. Bentuk kegiatan PLS yang demikian diidentifikasi dengan ciri; deliberate dan purposeful namun tidak bersifat designated.

Bentuk kegiatan PLS yang tergolong formal instructional learning dibedakan dengan bentuk kegiatan PLS yang tergolong natural societal learning yakni, bahwa yang pertama bersifat terancang dan karena itu kegiatannya diorganisasikan (designated and organized), dan dengan demikian juga lebih bersifat sistematis. Sedangkan yang kedua tidak bersifat terancang, tidak diorganisasikan dan karena itu tidak bersifat sistematis. Banyak pakar PLS di masa lalu yang tidak menggolongkan bentuk kegiatan yang kedua itu sebagai kegiatan belajar, oleh karena seringkali sifatnya insidental. Akan tetapi Apps dan Lovell (1980) dengan tegas menyatakan sebagai aktivitas belajar. Sifatnya yang insidental tidak ekuivalen

dengan aksidental. Sifat insidental tersebut juga tidak dengan sendirinya dapat disamakan dengan peristiwa kebetulan (fortuitous), sebagaimana dikatakannya : "...incidental learning -- work, parenthood, social of technological change, do-it yourself -- are not incidental (in the sense of being fortuitous) at all". Yang penting bagi kedua pakar tersebut (Apps dan Lovell) ialah adanya unsur kesengajaan dan adanya tujuan. Bagaimanapun kegiatan semacam ini dimaksudkan untuk mendapatkan perolehan berupa gagasan-gagasan, fakta-fakta, sikap-sikap, dan kecakapan-kecakapan (menurut istilah Lovell), agar supaya orang dewasa itu dapat lebih memahami serta mengendalikan lingkungan sosial dan lingkungan okupasinya.

Sejak ia mulai menaruh perhatian yang lebih besar terhadap gagasan dan konsep koperasi pedesaan versi baru tersebut, yang dimaksudkan untuk diaplikasikan oleh pemerintah dalam komunitas pedesaan, H. Palessei, mulai mengajak beberapa orang terkemuka di antara pamong desa dan kerabat keluarganya untuk bersama-sama mempelajari dan memahami secara lebih baik. Meskipun ia belum pernah menyatakan secara terbuka mengenai persepsinya tentang gagasan dan konsep koperasi pedesaan tersebut namun menurut pengakuannya, ia sejak saat itu menangkap secara intuitif peluang mengaplikasikan gagasan konsep koperasi pedesaan itu di dalam komunitas desanya. Ia mengatakan, melihat adanya peluang tersebut secara intuitif dengan

alasan tidak cukup mampu memahami secara teoritis konsep koperasi itu secara keseluruhan aspeknya dan detailnya. Atas dasar itu pula, ia melibatkan beberapa orang yang dipandangnya dapat diajak memikirkan dan memahami masalah tersebut.

Semenjak ia mulai mengajak beberapa orang yang di pandangannya dapat diajak bersama-sama memikirkan dan mempelajari kemungkinan aplikasi gagasan dan konsep koperasi pedesaan itu, maka sumber belajar mengenai hal itu diperluas. Selain M. Yusuf Karim, seperti telah disebutkan, maka sewaktu-waktu juga dimintanya A. Azis Sinrang untuk memberikan penjelasan kepada mereka mengenai masalah koperasi tersebut. A. Azis Sinrang adalah juga seorang petugas pada Kandepkop, yang seringkali bertugas memberikan penyuluhan perkoperasian. Dengan demikian, bentuk kegiatan formal instructional learning dalam lingkungan kelompok kecil, yang anggotanya terdiri dari H. Palessei, H. Abdul Hafid, H. Sanka, Abdullah Karim, dan Ibnu Hajar.

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa secara instuitif ia melihat peluang kemungkinan pengaplikasian gagasan dan konsep koperasi itu dalam komunikasi desanya. Ada beberapa faktor yang dipandangnya menjadi dasar persepsinya yang demikian. Pertama, stratifikasi sosial di desanya tidak mengenal kesenjangan antarstrata, sebagaimana keadaan yang dikenalnya di daerah Bulukumba lainnya

khususnya, dan tanah Bugis umumnya. Di desa Bontosunggu, menurut pengakuannya, tidak ada tradisi kebangsawanan. Biasanya orang-orang yang merasa diri golongan bangsawanlah yang sulit diajak bekerja sama untuk kepentingan bersama, karena seringkali mereka mengidap "keangkuhan tradisi". Oleh karena itu, mereka acapkali bersikap eksklusif.

Dari pengamatan langsung, penulis dapat mengungkapkan makna tidak adanya tradisi kebangsawanan yang mewarnai kehidupan komunitas desa ini. Dalam percakapan sehari-hari tidak terdengar ada di antara warga desa yang disapa puang, petta, karaeng, atau andi. Hal yang demikian, lazim dijumpai di daerah tanah Bugis lainnya, termasuk di desa tetangga seperti Gattareng, Kindang, dan lainnya.

Stratifikasi sosial yang sederhana, yang hanya terdiri atas kelas elit dan massa, nampaknya mempunyai kesamaan dengan temuan penelitian pada empat desa di Jawa Barat, yang dilakukan pada tahun 1970 oleh W.F.M. Hofsteede. Keempat desa yang ditelitinya itu ialah Situraja, Bangbayang, Sindangsari, dan Purwodadi. Patokan pembentukan strata berdasarkan atas status sosial, dalam mana kelas elit mencakup kedudukan-kedudukan seperti lurah dan pamong desa lainnya, pegawai negeri dan guru, tokoh agama dan petani kaya.

Dalam pada itu secara hipotesis tradisional,

penduduk desa Bontosunggu dapat dipandang seluruhnya tergolong tomaradeka, karena tidak adanya golongan bangsawan tersebut. Dengan demikian tingkat homogenitas penduduk juga relatif tinggi. Keadaan yang demikian, merupakan salah satu prakondisi yang favorable bagi adanya suasana kebersamaan, kerjasama dan solidaritas sosial. Makna itu pulalah kiranya yang ditangkap secara intuitif H. Palessei dalam kaitannya dengan peluang aplikasi gagasan dan konsep koperasi pedesaan yang diinformasikan. Adanya iklim kebersamaan, kerja sama serta solidaritas sosial dalam suatu komunitas pada hakikatnya merupakan basis sosiopsikologis bangunan dari suatu koperasi.

Kedua, desa Bontosunggu dan desa-desa lain di sekitarnya memang merupakan sentra penghasil gabah yang utama bagi kabupaten Bulukumba. Kenyataan tersebut juga merupakan unsur penunjang bagi upaya suatu lembaga koperasi pedesaan jika itu terwujud. Ketiga, faktor dirinya sendiri sebagai toriasiri atau tokoh panutan. Ia menyadari makna yang ada di balik unsur tokoh panutan tersebut. Jika saja ia yang merintis gerakan koperasi itu di desanya mengapa tidak mungkin warga di sekitarnya bersama-sama mendukungnya. Keempat, posisinya sebagai kepala desa yang merupakan kepanjangan dari perangkat birokrasi pemerintahan menuntut loyalitas birokratik terhadap instruksi dari atas. Jika pada suatu saat konsep

koperasi pedesaan tersebut harus diterapkan, maka sebagai orang yang sudah dikenal loyalitasnya, ia tidak mau bersikap setengah-tengah di dalam melaksanakannya. Jika bertempur melawan pembrontak DI/TII, ia mau melakukannya, sudah selayaknya pula ia siap mempelopori gerakan koperasi di desanya. Kelima, sikap skeptis masyarakat dan citra negatif koperasi dalam penanganan masyarakat seharusnya diantisipasi sebagai tantangan yang tidak boleh dihindari. Yang penting justru bagaimana melibatkan semua pihak agar tantangan tersebut menjadi tantangan bersama, dan sebaliknya kegagalan mengatasinya dipersepsi sebagai kegagalannya semua pihak yang terlibat.

Demikianlah, ketika pada saat terlibatnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan, Nomor 147/SK/V/1973 tentang pembentukan BUUD/KUD, maka pada tanggal 7 Mei 1973 dibentuklah BUUD/KUD di desa Bontosunggu, seperti di desa-desa lain juga, H. Palessei telah siap mengambil keputusan mengadopsi inovasi gagasan dan konsep koperasi pedesaan tersebut. Mungkin hal ini yang tidak terjadi di desa-desa lain yang ternyata kemudian tidak mampu mengembangkan koperasinya. Hal yang demikian ini, misalnya BUUD/KUD desa Bialo, desa tetangga paling dekat dengan desa Bontosunggu, yang ternyata tidak mampu mempertahankan eksistensinya. BUUD/KUD ini pada tahun 1988 terpaksa diintegrasikan (amalgamasi) ke KUD Mattirobulu. Dengan pengintegrasian

tersebut, maka wilayah kerja KUD Bontosunggu sendiri ditambah atau diperluas lagi dengan desa Bialo, dan kemudian juga dengan desa Palambarae.

Sikap terbuka H. Palessei selaku pemimpin puncak lokal (local top leader) desa Bontosunggu terhadap gagasan dan konsep koperasi pedesaan yang diperkenalkan, yang kemudian meningkat menjadi kemauan untuk mencoba memahaminya, akhirnya mengantarkannya sampai kepada tanggapan berupa keputusan adopsi inovasi itu, maka untuk selanjutnya mulailah babak baru proses pengembangan gerakan koperasi pedesaan di desa Bontosunggu.

B. Perintisan Gerakan Koperasi Pedesaan

Keputusan adopsi inovasi gagasan dan konsep koperasi pedesaan oleh pemimpin puncak lokal, menempatkannya pada posisi sebagai subyek pelaku utama proses komunikasi difusi inovasi. Posisi ini berbeda dengan posisi sebelumnya, yakni sebagai sasaran penerima pesan (message) komunikasi. Pada posisinya yang baru, ia menjadi sumber informasi konsep dan sebagai dinamisator gerakan perintisan.

1. Penentuan Sasaran Difusi Inovasi

Sasaran pertama yang dipilih oleh H. Palessei untuk diajaknya bersama-sama mendukung gagasan serta konsep koperasi itu, ialah kerabat keluarganya yang telah lebih

dahulu dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan informal seperti disebutkan di atas. Mereka itu ialah, H. Abdul Hafid, H. Sangka, Abdullah Karim, dan Ibnu Hajar.

Dari tindakan memilih sasaran komunikasi difusi inovasi yang sangat terbatas itu, menunjukkan adanya sikap kehati-hatian dari H. Palessei. Ia tidak langsung memassalkan gagasan tersebut kepada segenap warga desanya, sekalipun ia sebagai pemimpin puncak lokal, dapat melakukannya. Apalagi jika dikaitkan dengan kapasitasnya pemimpin panutan. Alasan yang mendasari cara yang ditempuhnya itu ialah adanya citra negatif koperasi dan demikian juga skeptis masyarakat yang harus diperhitungkan daya hambatnya.

Meskipun mereka sudah beberapa waktu bersama-sama menelaah untuk memahami secara lebih baik konsep koperasi tersebut, dengan nara sumber kedua petugas Kandepkop, M. Yusup Karim dan A. Azis Sintrang, H. Palessei belum pernah sebelumnya menyatakan secara terbuka akan mendukung secara sepenuh hati suatu gerakan koperasi berdasarkan konsep tersebut.

2. Metode dan Teknik Penyampaian

Dalam suatu pertemuan di rumah H. Palessei, yang sengaja dilakukannya dan dihadiri oleh kerabat keluarga yang telah dilibatkan menelaah untuk memahami konsep koperasi pedesaan itu, ia mengemukakan secara terbuka maksudnya untuk menggerakkan koperasi yang dimaksudkan

oleh gagasan dan konsep tersebut. Pertemuan itu sengaja dilaksanakannya di rumahnya sesudah shalat isya", dan bukan di kantor desa. Tujuannya ialah untuk menghindari kesan formal. Hadir dalam pertemuan tersebut, selain H. Palessei, ialah H. Abdul Hafid, H. Sangka, Ibnu Hajar, Abdullah Karim dan M. Yusuf Karim.

Dengan metode komunikasi informal antarpersonal tatap muka, H. Palessei menyampaikan maksudnya seperti disebutkan di atas. Sedangkan teknik yang digunakan adalah teknik verbal-versuasif. Dalam khasanah kepustakaan, proses penyebaran inovasi melalui hubungan tatap muka yang demikian biasa disebut difusi atau difusi inovasi.

Dalam pertemuan silaturahmi tersebut di atas tema utama perbincangan adalah gagasan dan konsep koperasi pedesaan itu dan masalah aplikasinya dalam kehidupan masyarakat. Masalah-masalah lain hanya dibicarakan secara tidak mendalam, seperti keadaan keluarga masing-masing, keadaan usaha dan kehidupan masing-masing, dan sebaliknya. Tema-tema perbincangan yang bersifat sampingan tersebut, memang merupakan kelaziman dalam tradisi silaturahmi. Namun yang lebih penting dikemukakan di sini, ialah bahwa tradisi silaturahmi masih tetap penting eksistensinya sebagai sarana modernisasi masyarakat, yakni dalam hal ini ialah upaya mengembangkan gerakan koperasi dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat.

Dalam proses komunikasi difusi inovasi untuk

perintisan gerakan koperasi pedesaan ini, H. Palessei menyampaikan beberapa dasar pemikiran yang melandasi urgensi pengembangan gerakan ini. Pertama, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah kewajiban utama dari orang yang menduduki status pemimpin. Secara duniawi status pemimpin di desanya berada pada dirinya. Akan tetap secara ukhrowi semua orang terutama yang mampu adalah pemimpin. Status kepemimpinan masing-masing orang itu akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian dihadapan Tuhan. Atas dasar itu ia merasa terpanggil untuk tugas pengembangan gerakan koperasi itu. Kedua, menurut pendapatnya apabila koperasi itu kelak dikelola sungguh-sungguh dan jujur, dengan meniatkannya sebagai ibadah, insya Allah akan mencapai tujuannya, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketiga, karena sudah diinstruksikan oleh pemerintah, maka tidak ada alternatif lain untuk tidak melaksanakannya. Jika ia tetap dilaksanakan juga tetapi oleh orang yang tidak bersungguh-sungguh, tidak jujur dan tidak memandangnya sebagai amal ibadah, maka akan berakhir dengan kegagalan. Kegagalan tersebut yakni tidak berhasil memperbaiki kehidupan masyarakat di desa kita, pada hakikatnya sedikit banyak adalah juga tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, terpulang lagi kepada status kepemimpinan kita yang merupakan tumpuan harapan oleh masyarakat desa. Sebaliknya apabila dicapai hasil, maka keberhasilan itu tentu akan membawa nama harum

keluarga dan kerabat keluarga kita juga. Keempat, sikap skeptis masyarakat yang sudah ada akan berkembang dan meluas ke usaha-usaha lainnya, apabila gerakan koperasi mengalami kegagalan disebabkan karena ditangani oleh orang yang kurang bersungguh-sungguh, disebabkan karena kita membiarkannya, dan tidak mau turun tangan sendiri.

Dalam pertemuan silaturahmi tersebut, sebenarnya H. Abdul Hafid, mengingatkan bahwa di dalam masyarakat telah berkembang sikap skeptis dan citra koperasi adalah tidak menguntungkan (negatif). Faktor tersebut akan merupakan hambatan yang harus diperhitungkan. Apabila koperasi itu kelak menjumpai kegagalan, maka pandangan masyarakat terhadap kita akan buruk sekali. Di kalangan masyarakat terdengar ucapan asennamupa koperasi, kuperra'si, (namanya pun juga sudah koperasi, artinya (Bugis) kuperas lagi. Oleh H. Palessei, peringatan dari H. Abdul Hafid tersebut ditanggapi, bahwa justeru karena itu maka tidak boleh dibiarkan upaya koperasi yang diinstruksikan pemerintah itu ditangani oleh sembarang orang. Ia harus ditangani oleh orang yang betul-betul akan berusaha sungguh-sungguh mensukseskannya. Dan orang yang demikian adalah kita ini juga. Abdullah Karim, menantu H. Palessei yang berusia relatif muda pada saat itu, yakni sekitar 26 tahun, mengemukakan pandangan yang optimistik. Menurut pengetahuan yang diperolehnya sebagai hasil dari berbagai perbincangan sejak dilibatkan dalam berbagai

pertemuan yang lalu, bidang garapan koperasi itu kelak yang utama adalah pengelolaan hasil pertanian dan pemasarannya. Apabila semua atau sebagian besar gabah dan beras petani di Bontosunggu ditampung oleh koperasi, kemudian pemasarannya ditangani oleh koperasi, maka prospeknya cukup cerah. Demikian juga halnya dengan sarana produksi pertanian. Mesin giling gabah (huller) yang masih bekerja, apabila juga dialihkan pengelolaannya kepada koperasi desa, maka prospek pengembangan koperasi tersebut akan cerah.

Menurut tokoh muda Abdullah Karim, penguasaan pengelolaan dan pemasaran gabah dan beras serta penyediaan dan penjualan sarana produksi pertanian, dapat dilakukan oleh koperasi desa, apabila dikaitkan dengan kharisma H. Palessei sebagai tokoh panutan. Artinya masyarakat harus tahu bahwa tokoh utama koperasi itu adalah H. Palessei.

Tokoh muda Abdullah Karim karena cepat menikah, tidak sempat menyelesaikan pendidikan pada SMA Bulukumba. Ia menikah dengan teman sekolahnya, salah seorang putri H. Palessei. Sebelum dan semenjak menikah itu, ia melakukan kegiatan wiraswasta di bawah bimbingan orang tuanya (H. Abdul Karim), seorang pengusaha pribumi yang berhasil di Bulukumba Timur. H. Adul Karim berusaha sebagai pedagang pengumpul hasil bumi di Bulukumba Timur, memasarkannya ke Ujungpandang dan Surabaya, dengan

menggunakan jasa transport laut dari usahanya sendiri. Ia memiliki tiga buah perahu layar motor jenis pinisi yang melayari jalur Bulukumba, Ujungpandang, dan Surabaya. Dari Bulukumba perahu tersebut mengangkut hasil pertanian ke Ujungpandang dan Surabaya, dan kembalinya memuat barang-barang campuran untuk pasaran lokal.

Tampaknya dari pengalaman magang pada orang tuanya itu, Abdullah Karim memiliki wawasan bisnis yang terbiasa berorientasi ke masa mendatang, berdasarkan evaluasi prakondisi masa kini.

Pertemuan pada hari itu tidak dipaksakan untuk melahirkan suatu kesepakatan oleh H. Palessei untuk membentuk pengurus koperasi. Ia masih mencari waktu yang tepat untuk hal tersebut. Kurang lebih seminggu kemudian, H. Palessei mengadakan pertemuan serupa lagi dengan khalayak yang diperluas. Dalam pertemuan kali ini, selain peserta seperti dalam pertemuan sebelumnya, diajak pula H. Ajusu dan Muhammad Dahlan B.

Proses difusi inovasi yang ilancarkan oleh H. Palessei sebagai pemimpin puncak lokal dengan menekankan teknik pendekatan antarpersonal yang bersifat persuasif, menghasilkan terbentuknya pengurus BUUD/KUD desa Bontosunggu. Semula H. Palessei memegang jabatan ketua, sejalan dengan pandangan yang telah dikemukakan oleh Abdullah Karim, agar masyarakat mengetahui, bahwa tokoh penggerak utama koperasi desa adalah pemimpin

panutan tersebut. Akan tetapi kemudian diperoleh informasi dari Kandepkop bahwa kepala desa tidak boleh menjadi ketua BUUD/KUD. Karena itu disepakati kemudian, H. Abdul Hafid memegang jabatan sebagai ketua BUUD/KUD, sedangkan H. Palessei memegang jabatan sebagai Badan Pemeriksa. Dengan diperoleh kesepakatan di antara sejumlah orang tersebut, yakni H. Palessei, H. Abdul Hafid, H. Sangka, Abdullah Karim, H. Ibnu Hajar, H. Ajusu, dan M. Dahlan, untuk bersama-sama merintis koperasi pedesaan di Bontosunggu, maka secara praktis telah mewujudkan nyata adanya BUUD/KUD di desa tersebut. Mereka yang disebutkan di atas dapat dikatakan sebagai kelompok perintis gerakan koperasi pedesaan setempat. Dalam konsep komunikasi difusi inovasi dari Rogers, mereka dapat digolongkan sebagai early adopters atau pendahulu.

3. Sarana Silaturahmi Sebagai Sarana Difusi

Sebagaimana dipaparkan di atas, kegiatan penyebaran gagasan dan konsep koperasi pedesaan (proses difusi inovasi) dilakukan oleh H. Palessei dengan lebih dahulu menentukan target sasaran pendukung secara selektif terbatas. Metode yang digunakannya ialah komunikasi informal tatap muka, sedangkan teknik yang digunakan ialah pendekatan hubungan antarpersonal persuasif.

Adapun sarana yang acapkali digunakan ialah tradisi silaturahmi. Hal ini sangat dimungkinkan karena sasaran proses difusi inovasi adalah kalangan kerabat

keluarganya. Tradisi silaturahmi di pedesaan Sulawesi Selatan, di antara sesama kerabat keluarga, masih merupakan suatu realisasi sosial. Bentuknya yang lazim adalah saling kunjung jika ada sesuatu keperluan, atau apabila dirasakan agak lama tidak saling bertemu.

Di balik peristiwa saling mengunjungi itu, terdapat makna, dalam mana pihak keluarga yang dikunjungi merasa mendapatkan penghargaan atau kehormatan, sedangkan yang berkunjung merasa lega hati karena telah menunaikan suatu kewajiban moral yakni melakukan suatu kebaikan di antara mereka. Sebaliknya pihak keluarga yang merasa mendapat kehormatan dikunjungi, juga merasa berkewajiban moral untuk membalas kebaikan itu kelak pada suatu waktu.

Dalam pada itu status senioritas dalam hubungan kekerabatan, kekeluargaan, bahkan juga dalam komunitas desa, dipandang memiliki hak penghormatan yang lebih. Oleh karena itu, intensitas perasaan kehormatan akan lebih besar dialami oleh keluarga yang dikunjungi, apabila yang berkunjung lebih senior atau lebih tinggi status sosialnya dalam komunitas desa. Sejalan dengan itu, maka rasa kewajiban moral untuk mengimbangi kebaikan dan/atau kehormatan yang telah diberikan kepadanya itu, juga cenderung lebih kuat.

Dari paparan yang dikemukakan di atas, dapat dibayangkan bagaimana suasana kejiwaan yang dialami seseorang atau suatu keluarga yang mendapat kehormatan

dikunjungi H. Palessei, tokoh toriasiri di kalangannya.

Tingkat perkembangan proses difusi gagasan dan konsep koperasi itu, selanjutnya diperluas lagi untuk memenuhi syarat keanggotaannya minimal 25 orang. Dalam kegiatan penyebaran gagasan dan konsep koperasi tersebut, sasaran yang dipilih masih terbatas di kalangan keluarga dan kerabat dekat. Kegiatan penyebaran itu masih dilakukan H. Palessei dengan menggunakan metode komunikasi informal antarpersonal tatap muka. Teknik pendekatan yang digunakan juga tetap mengutamakan hubungan antarpersonal dengan pendekatan persuasif, dengan memanfaatkan sarana tradisi silaturahmi.

4. Kredibilitas Pemimpin Puncak Lokal Sebagai Unsur Penunjang Proses Difusi

Untuk merekrut pendukung gerakan koperasi dari kalangan kerabat keluarga dekat, untuk memenuhi syarat keanggotaan minimal 25 orang tersebut, H. Palessei tidak merasa lebih sulit dari pada sebelumnya. Untuk merekrut kelompok perintis, yaitu tujuh orang pertama pengadopsi potensial, ia merasa perlu melakukan persuasi melalui beberapa kali pertemuan informal. Pada waktu-waktu tertentu, juga dengan menggunakan nara sumber dari Kadepkop yang kebetulan juga tergolong kerabat dekat, yakni Yusuf Karim dan sekali-sekali juga A. Azis Sinrang.

Upaya perluasan untuk memperoleh jumlah pendukung guna memenuhi syarat keanggotaan minimal, masih dilakukan

di kalangan keluarga dekat. Tidak banyak kesulitan yang berarti yang dijumpai dalam upaya tersebut. Kharismanya sebagai tokoh toriasiri, seorang yang disegani dan dipatuhi di kalangannya merupakan unsur penunjang utama dalam hal itu. Selain itu juga nama-nama yang telah diketahui turut serta dalam upaya perintisan, seperti H. Abdul Hafid, H. Sangka, H. Ajusu, dan lain-lain merupakan orang-orang yang terpandang.

Citra sebagai tokoh toriasiri, faktor senioritas serta status kepemimpinan formal dan informal merefleksikan kredibilitas H. Palessei dalam persepsi keluarga, kerabat, dan komunitasnya. Dalam kapasitasnya yang demikian, kunjungan silaturahmi yang dilakukannya terhadap keluarga dan kerabatnya mudah menimbulkan suasana psikologis untuk mengikuti ajakannya.

Di lain pihak bagi keluarga-keluarga yang tergolong dalam rumpun toriasiri dari segi etika moral merasa sudah selayaknya untuk mengikuti ajakan atau memenuhi anjuran dari tokoh toriasiri itu. Jika ia tidak mengikuti anjurannya, apalagi menolak ajakannya, maka tindakannya itu dipandang mempunyai makna sebagai penyimpangan dari etika moral kekeluargaan dan atau kekerabatan. Oleh karena itu, dalam komunitas Bugis-Makasar, terdapat semangat kesetiakawanan atau solidaritas yang kuat, yang diarahkan ke luar, meskipun ke dalam mungkin bersifat retak atau bersaing.

Dari uraian yang dikemukakan di atas tampak jelas makna yang ada di balik kredibilitas seseorang atau pemimpin, yang dapat menjadi suatu kekuatan untuk mendinamisasikan suatu komunitas. Dengan perkataan lain, kredibilitas pemimpin yang menjadi penggerak difusi inovasi, merupakan faktor penunjang utama proses difusi inovasi tersebut.

Dalam upaya H. Palessei merekrut pendukung gerakan koperasi di desanya, maka faktor kredibilitasnya bersifat memudahkan baginya.

Dengan jumlah tujuh orang sebagai perintis (kelompok perintis) dan secara keseluruhan 25 orang pendukung, gagasan dan konsep koperasi pedesaan BUUD/KUD mulai diaplikasikan dan diadaptasikan di desa Bontosunggu.

5. Ciri Stratifikasi Sosial dan Kelompok Elit Lokal Sebagai Prakondisi Pengembangan Semangat Koperasi

Telah disinggung terdahulu bahwa di desa Bontosunggu tidak terdapat tradisi kebangsawanan. Jika dikaitkan dengan konsep tradisi pelapisan sosial etnis Bugis-Makassar, maka dapat dikatakan keseluruhan penduduk desa adalah golongan tomaradeka. Dalam konsep tradisi pelapisan sosial di daerah Sulawesi Selatan pada umumnya, golongan ini menempati lapisan tengah (middle class) dari struktur pelapisan sosial. Lapisan atas (upper class) ditempati oleh golongan bangsawan, sedangkan lapisan bawah

(lower class) ditempati oleh golongan ata.

Golongan bangsawan Bugis-Makassar (anak arung atau anak karaeng), lazim menggunakan gelar Andi di depan nama dirinya atau Petta X di belakang nama dirinya. Dalam percakapan sehari-hari, biasanya mereka disapa andi bagi yang lebih muda dalam hal usia, atau petta jika ia lebih tua dari seseorang dari kalangan middle class dan dari kalangan lower class.

Sapaan andi atau petta tersebut mengisyaratkan kewajiban lapisan bawah menghormati kepada golongan bangsawan lebih daripada di antara sesamanya, dan tidak sebaliknya. Hal yang demikian ini merupakan sebagian dari "hak privilese" (privilege) yang masih sering hendak dipertahankan. Hal ini tidak jarang menjadi motif dasar adanya sikap eksklusif golongan atas tersebut. Sikap eksklusif itu pada gilirannya dapat menghambat semangat kebersamaan dan solidaritas sosial. Sedangkan semangat kebersamaan dan solidaritas sosial, merupakan prinsip utama dalam konsep koperasi. Semangat koperasi dapat tumbuh dan dikembangkan dari semangat kebersamaan, solidaritas, dan kesediaan untuk bekerja sama.

Menurut H. Palessei, salah satu faktor yang memungkinkan pengembangan gerakan koperasi di Bontosunggu ialah tidak adanya golongan masyarakat di desa tersebut yang bersikap eksklusif, yang menghendaki perlakuan istimewa dalam kehidupan bersama. Umumnya warga desa

merasa derajatnya sama saja semua, karena merasa diri sebagai tomaradeka. Menurut pengetahuannya, orang-orang yang merasa diri lebih tinggi derajatnyalah yang tidak mudah diajak bekerja sama. Apalagi jika yang mengajaknya bekerjasama dianggapnya berasal dari golongan yang derajatnya lebih rendah.

Pendapat H. Palessei tersebut di atas sejalan dengan pendapat dari berbagai sumber dari kalangan warga desa. Suasana kebersamaan dialami penduduk selama bertahun-tahun semenjak pulihnya keamanan. Gejolak politik pada masa partai juga tidak dirasakan penduduk. Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak pernah ada di desa ini, meskipun sebagian besar penduduknya adalah petani, yang di Jawa Tengah, misalnya, mudah menjadi pengikutnya. Tindak kriminal juga tidak pernah terjadi selama beberapa dasawarsa.

Nurdin S., seorang guru SD yang berasal dari Tiro, Bulukumba Timur dan sudah berdomisili di Bontosunggu sejak tahun 1981, membandingkan suasana kehidupan di sini dengan di daerah asalnya. Ia berpendapat, warga Bontosunggu lebih mudah diminta kesediaannya berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan atau memperbaiki tempat-tempat ibadah, saluran air dan sebagainya, dibanding dengan warga desa asalnya. Ia menilai hal itu mungkin disebabkan tidak ada orang yang merasa lebih tinggi derajat keturunannya dibanding warga lainnya. Tidak ada orang yang merasa tidak

layak bekerja bersama-sama secara fisik dengan orang banyak. Juga tidak terlihat gejala adanya orang yang merasa tidak rela diatur dalam kerja bakti kemasyarakatan. Misalnya, jika yang mengatur itu dipandang lebih rendah derajat sosialnya daripada dirinya. Hal yang demikian dapat terjadi di daerah asalnya.

Realitas pelapisan sosial yang tidak mengalami kesenjangan dalam kelompok elit lokal yang tidak bersifat eksklusif, menurut Ince Mansyur, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Bulukumba, merupakan salah satu faktor yang memungkinkan berkembangnya gerakan koperasi di Bontosunggu. Akan tetapi yang paling besar andilnya adalah H. Palessei dalam hal itu. Di daerah, lain menurut Ince Mansur, memang orang-orang yang merasa tergolong bangsawan acapkali bersikap oposisi terhadap usaha-usaha kemajuan. Apalagi jika mereka tidak memegang peranan penting dalam kehidupan sosialnya. Mungkin pada mereka terdapat perasaan iri hati, atau masih belum dapat melupakan masa lalunya ketika mereka yang menempati kedudukan penting dalam masyarakat.

Menurut Ince Mansur (64) lebih lanjut, menurut pengalamannya sebagai aktivis gerakan koperasi sejak usia muda, dinamika kehidupan komunitas desa umumnya ditentukan oleh kelompok elit lokal. Jika kelompok elit lokal bersikap eksklusif, hanya menaruh peduli terhadap kepentingan diri dan kelompoknya, tidak berorientasi

kepada kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka perkembangan desa tersebut mengalami hambatan. Oleh karena itu, di desa yang kelompok elit lokalnya bersikap demikian hingga saat ini tidak mampu menghidupkan koperasinya. Kenyataan yang demikian tidak terdapat di Bontosunggu.

Kelompok elit lokal di Bontosunggu justru adalah para kerabat keluarga H. Palessei. Dalam pada itu H. Palessei sebagai pemimpin puncak lokal, justeru mempelopori gerakan koperasi itu dan menggerakkan partisipasi kerabat keluarganya.

C. Pemanfaatan Konsep Nilai Budaya Lokal Sebagai Sumber Motivasi dan Dinamisasi

1. Menggali Kembali Makna Konsep Nilai Budaya Lokal

Pada waktu kelompok perintis sudah mulai bekerja dengan H. Abdul Hafid sebagai ketua, pemimpin puncak lokal, H. Palessei mulai mengingatkan dengan ungkapan padecenqi jamammu, aja muappakasiri.

Ungkapan tersebut dapat diterjemahkan secara harfiah? bekerjalah kalian dengan baik, jangan membuat kita malu. Kalimat singkat itu mengandung makna yang dalam dan luas. Makna yang dapat dipahami dari kalimat singkat itu ialah antara lain sebagaimana dipaparkan berikut ini. Pertama, hendaknya kalian bekerja sungguh-sungguh, sekuat tenaga, daya dan upaya agar gerakan koperasi yang sudah dirintis itu tidak menemui kegagalan, sebab kegagalan akan

berakibat siri (malu). Kegagalan akan membuktikan benarnya ungkapan melecehkan yang pernah terdengar dalam masyarakat : Bara iyapa Maksud ungkapan melecehkan ini menurut intonasinya, apabila diterjemahkan secara bebas, kurang lebih sama dengan ucapan apakah mungkin kali ini yang akan bisa ... berhasil.

Ungkapan melecehkan seperti itu lahir dari sikap skeptis masyarakat terhadap kegiatan semacam koperasi, yang oleh H. Palessei diduga sengaja dibesar-besarkan oleh kalangan yang merasa akan mendapat saingan dari koperasi. Namun oleh H. Palessei diambil hikmahnya dengan dengan mengangkatnya sebagai tantangan yang harus dihadapi oleh kelompok perintis. Maknanya yang diharapkan dapat dipahami di balik tantangan itu ialah dorongan atau motivasi keberhasilan (Ach) serta etos kerja keras.

Dalam konsep nilai budaya siri, suatu tantangan yang menghadang haruslah dihadapi dan bukannya dihindari bagi seseorang yang tergolong to engka sirina (orang yang ada sirinya atau ada harga dirinya). Hanya orang yang tergolong to degaga sirina (orang yang tidak punya siri atau tidak punya harga diri), yang mundur sebelum membuktikan pada dirinya dan pada masyarakat bahwa ia telah berjuang dengan segala kemampuannya mengerahkan segala daya dan upayanya.

Dalam konsep nilai budaya siri itu pula kehormatan seseorang atau martabat seseorang dinilai

seberapa jauh ia telah membuktikan diri sebagai orang yang tergolong to engka sirina. Perlu dikemukakan bahwa di kalangan masyarakat Bugis-Makassar yang beradab, yang telah menginternalisasikan nilai budaya siri melalui proses sosialisasinya, akan selalu berusaha menampilkan citra diri sebagai to engka sirina.

Dari paparan yang dikemukakan di atas dapat dipahami makna dari konsep nilai budaya siri, dalam kehidupan komunitas etnis Bugis-Makassar dan umumnya kelompok etnis pribumi di Sulawesi Selatan. Makna itulah yang digali kembali secara kreatif oleh H. Palessei, dikaitkan dengan upaya mendorong gerakan koperasi di desanya.

Konsep nilai budaya itu sendiri tidaklah dengan sendirinya berfungsi sebagai pendorong dinamika kelompok perintis. Nilai itu sendiri bersifat umum dan normatif, tidak memiliki vitalitas pada dirinya sendiri. Pemimpin yang kreatiflah yang merumuskannya kembali menjadi suatu konsep yang aktual dan kontekstual. Hal itulah yang dilakukan oleh pemimpin puncak lokal, H. Palessei, dalam memantapkan komitmen kelompok perintis terhadap misi gerakan koperasi. Dengan memantapkan komitmen terhadap misi gerakan koperasi, H. Palessei bermaksud mendorong semangat dedikasi, meningkatkan motivasi keberhasilan (nAch) dan memacu etos kerja keras para penyelenggara kegiatan koperasi, yakni kelompok perintis tersebut.

Di pihak lain bagi penyelenggara kegiatan koperasi itu, alternatifnya ialah bekerja sungguh-sungguh sepenuh hati agar misi gerakan koperasi dapat tercapai. Karena dari segi etika moral, nama baik bagi toriasiri adalah nama baik semua kerabat keluarga juga. Demikian pula sebaliknya aib baginya adalah aib bagi kerabat keluarga.

Dalam lingkup yang lebih luas, meliputi kelompok perintis penyelenggara kegiatan koperasi dan para pendukung kegiatan koperasi, H. Palessei mengaktualisasikan kembali konsep nilai; mali siparappe, telleng sipaonang. Secara harfiah kalimat tersebut berarti hanyut saling mendamparkan, tenggelam saling mengapungkan.

Ungkapan tersebut mengandung makna solidaritas atau kesetiakawanan, kerjasama, dan kebersamaan dalam keadaan kritis sekalipun. Dalam keadaan hanyut orang masih harus berusaha untuk saling membantu mendamparkan, dan dalam keadaan tenggelam sekalipun, orang masih harus berusaha bersama untuk saling mengapungkan.

Ungkapan lain yang diaktualisasikan kembali dari konsep nilai tradisional ialah pada idi pada elo, sipatuo sipatokkong. Secara harfiah ungkapan tersebut berarti, kita bersama-sama berkehendak, saling menghidupkan, saling menegakkan. Makna yang dimaksud ialah kebersamaan, tekad untuk maju bersama dengan jalan saling menunjang, saling menyokong dalam kehidupan dan usaha.

Kreativitas H. Palessei menggali dan mereaktuali-

sasikan nilai budaya tradisional, kemudian menjadikannya landasan etika moral gerakan koperasi di desanya. Dengan dasar etika moral itu, ia memotivasi para perintis dan mendinamisasikan para pendukung pertama koperasi desanya.

Bagi para penyelenggara kegiatan koperasi itu yakin kelompok perintis yang diketuai oleh H. Abdul Hafid, alternatifnya hanyalah bekerja secara sungguh-sungguh. Dukungan moral dan peranan aktif pemimpin puncak lokal memotivasi dan mendinamisasikan para pendukung gerakan koperasi, bagi mereka memberikan suasana kerja yang tenang (stabil).

2. Upaya Memperluas Dukungan

Koperasi merupakan organisasi yang mengutamakan pelayanan (service oriented). Oleh karena itu, maka kegiatan utamanya adalah pemberian pelayanan, baik kepada anggotanya maupun masyarakat sekitarnya.

Kegiatan pertama yang dilaksanakan kelompok perintis ialah melaksanakan program BUUD/KUD, yakni melakukan pembelian gabah dari petani dan memasarkannya ke Dolog (Depot Logistik). Selain itu mengelola Rice Milling Unit/Huller (RMU/Huller) atau unit penggilingan gabah dan Unit Pergudangan dengan lantai Jemur (GLJ). Semua kegiatan tersebut berkaitan dengan pelayanan anggota maupun bukan anggota.

Dalam rangka upaya memperluas keanggotaan sebagai

pendukung gerakan koperasi, maka pelayanan kepada anggota dan warga masyarakat umumnya diusahakan sebaik mungkin. Pemberian pelayanan yang baik juga dimaksudkan untuk berusaha menghapus citra negatif koperasi.

Dalam pada itu untuk menarik minat warga desa lainnya untuk menjadi anggota, maka dalam hal jasa penggilingan gabah, dibedakan antara anggota dengan bukan anggota. Bagi anggota dipungut jasa penggilingan sebanyak 1 liter beras untuk setiap 1 kaleng (20 liter) beras hasil gilingan. Sedangkan bagi pelanggan bukan anggota, dipungut jasa sebanyak 1,5 liter untuk setiap 1 kaleng beras hasil gilingan.

Selain pemberian jasa pelayanan yang baik, upaya memperluas dukungan keanggotaan, telah mulai dilakukan penyuluhan massal di mesjid-mesjid serta penyuluhan dalam kelompok-kelompok. Kegiatan untuk perluasan dukungan keanggotaan koperasi ini menggunakan metode komunikasi formal, dengan menggunakan sumber belajar, yakni petugas dari Kandepkop. Khalayak peserta belajarnya adalah jemaah shalat maghrib di mesjid-mesjid dan atau kelompok-kelompok tani. Pendekatan yang digunakan menekankan sikap persuasif. Sedangkan isi pesan pembelajarannya meliputi arti dan tujuan koperasi, manfaat berkoperasi, serta penjelasan-penjelasan praktis pelayanan koperasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha tani.

Kegiatan komunikasi difusi inovasi dalam bentuk

penyuluhan massal dan kelompok tersebut di atas, dilakukan dua kali sebulan pada mesjid yang berbeda dan atau kelompok yang berbeda.

Penyuluhan terhadap khalayak peserta belajar di mesjid-mesjid, selain mengkomunikasikan isi pesan perkerasian seperti disebutkan di atas dengan sumber belajar dari Kandepkop, juga menjelaskan kaitan masalah koperasi dengan nilai-nilai agama dengan sumber belajar pemuka agama setempat. Sedangkan H. Palessei turut hadir sebagai peserta belajar yang setia. Kehadirannya pada setiap kegiatan komunikasi difusi inovasi yang demikian, dimaksudkannya sebagai upaya pemberian motivasi terhadap khalayak belajar secara tidak langsung. Seseekali ia juga tampil di atas mimbar menyampaikan kata-kata sambutan, yang isi pesannya merekomendasikan gerakan koperasi di wilayah desanya.

Berkenaan dengan penggunaan pemuka agama sebagai sumber belajar lokal dalam kegiatan penyuluhan perkerasian tersebut, H. Palessei bersama dengan petugas penyuluhan dari Kandepkop lebih dahulu telah melakukan upaya pembelajaran melalui komunikasi informal antarpersonal dan tatap muka. Melalui cara itu pemuka agama yang bersangkutan secara persuasif dikembangkan kesadaran dan pengetahuannya tentang masalah perkerasian.

Dalam kegiatan komunikasi informal persuasif

antarpersonal dan tatap muka dengan pemuka agama tersebut, M. Yusuf Karim, petugas penyuluhan dari Kandepkop senantiasa mengemukakan norma agama yang memberikan justifikasi terhadap gagasan, konsep, dan program perkoperasian. Ayat Qur'an yang selalu dikutipnya untuk maksud tersebut ialah dari surat Al-Maa'idah ayat 2. Arti ayat tersebut, ialah: bertolong-tolonganlah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan ketaqwaan, dan janganlah bertolong-tolongan dalam hal berbuat dosa dan pelanggaran.

Menurut M. Yusuf Karim, ayat tersebut relevan karena pada dasarnya koperasi adalah wadah kegiatan untuk bekerja sama bagi kebaikan bersama, yaitu untuk kesejahteraan bersama. Jadi apabila kegiatan dalam berkoperasi dipersepsi demikian, maka pada hakekatnya agama memerintahkan umat untuk berkoperasi.

Pada awalnya menurut M. Yusuf Karim, ada juga di antara pemuka agama tersebut yang mempertanyakan adanya kemungkinan koperasi kelak dijadikan wadah bagi segelintir orang untuk kepentingannya sendiri, sehingga merugikan orang banyak. Jawaban yang diberikan oleh Yusuf Karim terhadap pertanyaan yang demikian ialah bahwa dalam pengelolaan mesjid atau lembaga apa pun dapat terjadi penyimpangan, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akan tetapi bukan berarti bahwa dengan demikian mesjid atau lembaga-lembaga lain tersebut tidak diperlukan.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa itulah sebabnya maka

aparatur pengelolaan koperasi dibedakan fungsinya, yaitu pengurus, badan pemeriksa, dan karyawan/manager. Pengurus berfungsi menentukan kebijakan serta program, karyawan dan manager melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari, sedangkan badan pemeriksa berfungsi sebagai pengawas dan pengendali. Fungsi yang terakhir ini sesungguhnya sangat baik apabila dilakukan atau diperankan oleh para pemuka agama, setelah lebih dahulu diberikan pelatihan seperlunya tentang pengetahuan dan kecakapan yang berkaitan.

Penyuluhan kelompok dilakukan melalui pertemuan kelompok tani. Pertemuan semacam ini biasanya dilaksanakan pada saat menjelang musim tanam atau saat menjelang musim panen. Jika penyuluhan dilakukan pada pertemuan menjelang musim tanam, maka isi pesan yang dikomunikasikan adalah perihal yang berkaitan dengan prosedur pengadaan dan penyaluran sarana produksi pertanian (saprota) atau sarana produksi padi (saprodi) oleh koperasi, seperti pupuk, obat-obatan, bibit, dan sebagainya. Apabila penyuluhan dilakukan saat menjelang musim panen maka isi pesan yang dikomunikasikan adalah berkenaan dengan perihal pembelian gabah atau pemberian jasa pelayanan penggilingan gabah oleh koperasi. Secara lebih konkrit dapat dikatakan bahwa isi pesan tersebut mencakup: 1) perlunya kebersamaan dan kerjasama di dalam usaha tani, 2) hubungan antara usaha tani dengan koperasi pedesaan, 3) tujuan dan prospek pencapaian tujuan koperasi, dan 4) hak

dan kewajiban anggota, pengurus, badan pemeriksa dan manajer serta karyawan koperasi.

Seperti halnya pada penyuluhan massal, yang dilaksanakan di mesjid-mesjid, H. Palessei senantiasa turut hadir, maka demikian pula halnya pada setiap kegiatan penyuluhan kelompok. Tujuannya ialah untuk menumbuhkan motivasi di kalangan warga kelompok peserta belajar pada kegiatan penyuluhan tersebut. Melalui komunikasi difusi inovasi semacam itu ia mengaktualisasikan kembali nilai budaya tradisional sebagai acuan persuasi. Dalam setting komunikasi yang demikian, hakikat kegiatan koperasi digambarkannya sebagai aplikasi dari konsep nilai etika moral pada idi pada elo, sipatuo sipatokkong, yang artinya, sesama kita sama bertekad, saling menghidupkan saling menegakkan/menyokong.

Baik dalam penyuluhan massal di mesjid, maupun pada penyuluhan-penyuluhan kelompok, tidak atau jarang sekali terjadi semacam dialog antara sumber belajar dengan peserta belajar. Suasana formal dalam kegiatan belajar PLS yang terancang, merupakan salah satu faktor kendala terjadinya dialog. Selain itu faktor "budaya diam" masyarakat desa di Sulawesi Selatan juga merupakan kendala terjadinya kegiatan belajar pembelajaran yang interaktif. Faktor lain, ialah tingkat kemampuan berpikir yang umumnya hanya mencapai tingkat operasi konkrit pada kebanyakan petani. Sedangkan dalam kegiatan pembelajaran dengan

metode komunikasi formal dengan pendekatan verbal, umumnya mensyaratkan kemampuan berpikir yang lebih tinggi. Sudah barang tentu adanya berbagai kendala tersebut tidak berarti bahwa kegiatan penyuluhan itu tidak mempunyai pengaruh sama sekali. Penyuluhan berkala tetap dilakukan di mesjid-mesjid untuk memperluas jangkauan proses difusi inovasi gagasan, konsep, dan program koperasi. Dalam setiap kegiatan penyuluhan tersebut, H. Palessei juga tetap rajin turut hadir meskipun ia tidak selalu turut berbicara.

Kehadirannya tersebut dimaksudkannya agar supaya dapat timbul dorongan moral pada khalayak untuk menaruh perhatian. Ia berpendapat bahwa apabila warga desanya masih merasa diri sebagai to enqka sirina, maka sedikit banyak kehadirannya dapat merupakan ikatan moral bagi warganya untuk ikut hadir dalam acara penyuluhan tersebut.

Meskipun upaya penyebaran gagasan koperasi telah diperluas jangkauannya meliputi kelompok-kelompok dan massa, namun H. Palessei tidak melepaskan perhatiannya sama sekali dari kelompok perintis. Ia masih tetap menaruh kepedulian terhadap pemeliharaan semangat dedikasi kelompok perintis.

Kelompok perintis mempunyai acara pertemuan bulanan, yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Kesempatan tersebut juga selalu digunakan untuk membicarakan masalah yang dipandang

perlu dipikirkan bersama dan dicarikan jalan keluarnya. Adakalanya kesempatan yang demikian juga digunakan untuk acara pelatihan administrasi dan organisasi. Dalam pertemuan bulanan itu H. Palessei juga sangat memerlukan untuk selalu hadir. Sekali-sekali ia mengingatkan akan misi yang diemban kelompok perintis, yaitu bahwa koperasi yang dikembangkan ini tidak boleh gagal di tengah jalan. Kegagalan di tengah jalan harus dipersepsi sebagai siri. Oleh karena itu, dalam upayanya memelihara semangat dedikasi kelompok perintis, kerap kali ia mengingatkan dengan nasehat, seperti; padecengi iokkana koperasie, aja lalo muakkabeang siri. Pernyataan itu secara harfiah berarti; perbaiki jalannya koperasi, jangan sekali-kali menghilangkan siri. Di balik pernyataan itu sebenarnya tersirat makna, agar kelompok perintis bekerja secara bersungguh-sungguh mengelola koperasi, sebab taruhannya adalah martabat atau kehormatan diri (siri). Oleh karena anggota-anggota kelompok perintis itu adalah pada idi (kita bersama), yakni orang-orang dari satu rumpun keluarga, maka martabat atau kehormatan yang menjadi taruhan tersebut adalah martabat atau kehormatan semua keluarga, martabat atau kehormatan bersama.

Hal yang sama juga dilakukan oleh H. Palessei terhadap kelompok pendukung. Tujuannya ialah untuk memelihara dan memupuk semangat kebersamaan dan kerja sama dalam ikatan koperasi. Paling sedikit usaha tani mereka

selalu terkait dengan kegiatan koperasi.

D. Pengembangan Gerakan Koperasi Pedesaan

1. Koperasi Unit Desa Sebagai Pola Koperasi Pedesaan

Upaya pengembangan gerakan koperasi pedesaan sudah mulai berlangsung prosesnya pada saat gagasan koperasi tersebut diluncurkan pertama kali. Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian pendahuluan, gagasan dan konsep koperasi pedesaan pola KUD dicetuskan pertama kali pada tahun 1971. Gagasan ini mulai didifusikan ke daerah-daerah lain pada tahun 1973.

Di lokasi penelitian ini gagasan dan konsep koperasi pedesaan pola ini diluncurkan pertama kali pada awal tahun 1973. Informasi dan penjelasan mengenai hal itu diterima oleh kepala desa melalui komunikasi formal. Sumber informasi pertama adalah bupati dan kepala Kandepkop.

Gagasan dan konsep awal koperasi pedesaan ini adalah BUUD/KUD, yang mempunyai fungsi sebagai badan pengelola pemasaran hasil produksi pertanian pangan. Pada dasarnya BUUD/KUD adalah juga merupakan amalgamasi dari koperasi-koperasi pedesaan yang ada sebelumnya, dan bentuk peralihan koperasi unit desa (KUD) yang diidealkan sebagai pola koperasi pedesaan pada masa selanjutnya.

Fungsi BUUD/KUD adalah sebagai pengelola pemasaran hasil produksi pertanian (pangan), dalam konteks suatu

Unit Desa. Fungsi penyuluhan dilaksanakan oleh petugas penyuluhan pertanian lapangan (PPL). Sedangkan fungsi perkreditan dilaksanakan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit desa.

Apabila fungsi-fungsi tersebut dipandang telah dapat dilaksanakan oleh KUD, maka BUUD dipisahkan secara keorganisasian dari KUD. Selanjutnya BUUD berfungsi sebagai badan pembina KUD, yang anggota-anggotanya terdiri dari kepala desa dan pemuka masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, saat mulai diperkenalkannya gagasan dan konsep BUUD/KUD sampai berkembangnya KUD, dipersepsi sebagai proses pengembangan gerakan koperasi pedesaan. Secara terinci proses digambarkan melalui tahap-tahap, 1) peluncuran gagasan dan konsep BUUD/KUD, 2) adopsi inovasi gagasan dan konsep, 3) difusi inovasi gagasan dan konsep yang meliputi tahap perintisan gerakan dan pengembangan gerakan koperasi pedesaan (pola KUD).

Koperasi pedesaan pola KUD merupakan organisasi koperasi serba usaha. Sebagai organisasi koperasi serba usaha KUD diharapkan menjadi wadah kegiatan ekonomi masyarakat desa, yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh warga masyarakat desa. Dalam konteks penelitian ini maka ujung dari proses pengembangan gerakan koperasi pedesaan, yang melalui tahap-tahap seperti disebutkan di atas, adalah terbentuknya dan berkembangnya KUD Mattirobulu.

2. Identifikasi Bentuk-bentuk Kegiatan Belajar-Pembelajaran dalam Proses Pengembangan Gerakan Koperasi Pedesaan

Fokus studi ini, sebagaimana telah dikemukakan pada bab pendahuluan, adalah proses pengembangan gerakan koperasi dalam suatu komunitas pedesaan. Sedangkan bidang kajiannya menekankan pada bidang studi Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Dalam perspektif PLS, proses pengembangan gerakan koperasi itu pada dasarnya adalah rangkaian tindakan dan atau peristiwa pendidikan.

Sebagai suatu rangkaian peristiwa dan tindakan pendidikan, di dalamnya dapat diidentifikasi bentuk-bentuk kegiatan belajar-pembelajaran. Dalam garis besarnya kegiatan belajar-pembelajaran tersebut dapat dibedakan atas dua macam, menurut setting dalam mana kegiatan belajar-pembelajaran itu berlangsung. Kedua macam setting belajar-pembelajaran tersebut masing-masing, ialah 1) natural societal setting dan 2) formal instructional setting.

a. Tahapan Peluncuran Gagasan dan Konsep

Pada tahap peluncuran gagasan dan konsep koperasi pedesaan (BUUD/KUD), pemimpin puncak lokal menerima informasi mengenai gagasan dan konsep tersebut dari perangkat birokrasi-atas desa (bupati, Kakandepkop, penyuluh). Metode yang digunakan oleh sumber informasi

adalah komunikasi formal. Sedangkan pendekatan yang digunakan bersifat verbal-instruktif dengan teknik ceramah dan atau pengarahan. Proses penyampaian informasi yang demikian, dalam perspektif PLS dapat dikategorikan sebagai bentuk kegiatan pembelajaran yang bersifat terancang dan terorganisasikan. Bentuk kegiatan pembelajaran yang demikian berlangsung dalam informal instructional setting.

Akan tetapi seperti telah dikemukakan terdahulu, pada awalnya pemimpin puncak lokal, H. Palessei tidaklah mempunyai perhatian dan atau minat khusus terhadap gagasan dan konsep yang diinformasikan. Sebabnya antara lain karena berbagai konsep dan program yang direkayasa di luar desa, yang kemudian hendak diaplikasikan dalam komunitas pedesaan, sudah pernah ada sehingga cenderung menimbulkan sikap rutinitas. Menurut istilahnya semua itu datang singgah kemudian berlalu.

Oleh kerana sifat pendekatan yang verbal instruktif, tidak adanya minat dan perhatian khusus, serta ciri "budaya diam" masyarakat pedesaan, maka usaha pembelajaran tahap peluncuran gagasan dan konsep koperasi tersebut, tidak atau kurang menumbuhkan dialog. Karena itu proses pembelajarannya tidak berlangsung secara efektif.

Upaya untuk mencari informasi dan penjelasan secara lebih lengkap, baru dilakukan kemudian setelah ia (H. Palessei) mengetahui, bahwa koperasi pedesaan yang

diidealkan menurut gagasan dan konsep tersebut, haruslah dibentuk sendiri, dimiliki dan dikelola sendiri serta dinikmati sendiri manfaatnya oleh warga masyarakat desa seluruhnya. Baginya, koperasi pedesaan yang diidealkan seperti itu, perlu diantisipasi sebaik-baiknya. Jika tidak, maka akan merupakan peluang yang nyata bagi orang yang kurang memiliki tanggung jawab sosial untuk menjadi pengelolanya, untuk kepentingannya sendiri.

Pemahaman yang diperolehnya mengenai ideal koperasi pedesaan menurut gagasan dan konsep yang diinformasikan itu, mendorong H. Palessei mencari penjelasan dan informasi yang lebih banyak, misalnya mengenai prosedur pembentukannya, pengelolaannya, keanggotaan dan kekuasaannya, hubungan proteksi dan fasilitatif dari atau oleh pemerintah, dan lain-lain. Upaya mencari penjelasan dan informasi lebih lanjut tersebut dilakukan bukan melalui kegiatan formal melainkan melalui kegiatan belajar-pembelajaran informal. Tradisi silaturahmi yang masih aktual antarkerabat keluarga di desalah yang terutama digunakannya sebagai sarana belajar, sebagaimana telah dipaparkan di muka.

Upaya mencari pemahaman mengenai suatu gagasan dan konsep dengan menggunakan keadaan, peristiwa, kesempatan maupun tradisi semacam itu, dapat dikategorikan sebagai natural societal learning. Bentuk kegiatan belajar yang demikian sifatnya tidak dirancang dan tidak

diorganisasikan. Oleh karena itu, kegiatannya mungkin berlangsung secara tidak sistematis. Namun adanya unsur kesengajaan dan orientasi kepada tujuan tertentu, maka kegiatan semacam itu tetap tergolong sebagai kegiatan belajar-pembelajaran.

Dari paparan yang dikemukakan di atas, tampak bahwa dalam suatu setting formal instructional learning yang dirancang dan diorganisasikan, seperti halnya ketika peluncuran gagasan dan konsep koperasi itu dilakukan, tidaklah dengan sendirinya terjadi proses pembelajaran yang efektif. Faktor utamanya ialah tidak terjadinya dialog dalam setting yang terancang, terorganisasikan dan bersifat formal tersebut. Justru dalam setting natural societal learning, yang tidak terlepas sebagai dampaknya, terjadi proses pembelajaran yang lebih efektif untuk memahami gagasan dan konsep koperasi itu, dengan peserta didik yang sama, dan dengan tema pembelajaran yang sama.

Sebagaimana diketahui pada tahap peluncuran gagasan dan konsep koperasi itu, proses pembelajaran menggunakan metode komunikasi formal dengan pendekatan yang menekankan sifat instruktif, yang menjadi peserta didik atau warga belajar adalah para pemimpin puncak lokal berbagai desa. Settingnya dirancang dan diorganisasikan dalam pola formal instructional setting. Dalam setting pembelajaran tersebut warga belajar lebih banyak bersifat pasif. Inisiatif dan kreativitas tidak berkembang di kalangan

warga belajar.

Keadaan yang demikian berkaitan dengan suasana formalistik dari suatu setting pembelajaran formal, dengan warga belajar orang dewasa. Selain itu setting tersebut dirancang dan diorganisasikan dalam konteks jenjang hierarki birokratik, di mana pola hubungan komunikasi satu arah sudah merupakan kelaziman.

Dalam natural societal setting, yang terjadi kemudian atas kesadaran dan rasa kebutuhan pada diri warga belajar (H. Palessei) sendiri, proses belajar menjadi lebih efektif. Inisiatif dan kreativitas warga belajar yang bersangkutan berkembang, didorong oleh motivasi internal untuk lebih memahami konsep dan gagasan yang dikomunikasikan. Sumber belajar dicari sendiri di lingkungannya, demikian juga peluang belajar diupayakan sendiri, di antaranya dengan memanfaatkan tradisi silaturahmi dan hubungan kekerabatan.

Dengan demikian tidak dapat disangkal bahwa adopsi inovasi yang dilakukan oleh pemimpin puncak lokal desa Bontosunggu terhadap gagasan dan konsep koperasi pedesaan itu, terjadi setelah melalui proses atural societal learning. Sudah barang tentu juga tidak diingkari adanya pengaruh yang diperoleh dari proses formal instructional learning yang dialami sebelumnya.

Keputusan adopsi yang dilakukan oleh pemimpin lokal itu tergolong keputusan adopsi inovasi individual

opsional. Keputusan yang demikian merupakan keputusan di mana individu yang bersangkutan bersifat aktif dalam pembuatan keputusan itu. Selain itu, keputusan tersebut dibuat terlepas dari keputusan yang dibuat oleh anggota sistem, yakni warga masyarakat desanya sebagai suatu komunitas.

Proses keputusan adopsi inovasi individual opsional yang dilakukan oleh pemimpin puncak lokal itu, dalam garis besarnya meliputi tiga tahapan, yaitu (1) tahap kesadaran, (2) tahap menaruh minat atau perhatian, dan (3) tahap penerimaan adopsi.

Tahap kesadaran terjadi pada diri pemimpin tersebut ketika ia mengetahui bahwa koperasi pedesaan yang diidentikkan oleh gagasan dan konsep yang dikomunikasikan itu, merupakan koperasi yang harus dibentuk, dikelola, dimiliki, dan dinikmati bersama oleh warga masyarakat desa itu sendiri. Berdasarkan pengetahuannya itu ia menyadari bahwa ia tidak selayaknya berpangku tangan. Ia harus tampil melalui prakarsa mengembangkan gerakan koperasi di desanya untuk merealisasikan gagasan dan konsep tersebut. Jika orang lain yang mengambil prakarsa memulainya, ia khawatir kelak koperasi itu dikelola untuk kepentingan segelintir orang menguasainya saja. Di satu sisi, kesadaran terhadap gagasan dan konsep itu sebagai suatu yang harus diaplikasikan (instruktif) namun juga cukup berpeluang maju jika dikelola secara sungguh-sungguh, di

sisi lain, kurang atau belum cukup ditopang dengan kejelasan informasi. Keadaan yang demikian menyebabkan timbulnya perasaan kebutuhan untuk memperoleh informasi lebih banyak, yang pada gilirannya menumbuhkan motivasi mencari tambahan informasi dan penjelasan.

Tahap menaruh minat atau perhatian khusus merupakan kelanjutan dari adanya kesadaran terhadap ide tetapi kurang ditopang dengan kejelasan informasi secara memadai itu. Keadaan yang demikian itulah yang menumbuhkan motivasi pemimpin puncak lokal, H. Palessei untuk aktif mencari informasi tambahan serta penjelasan yang lebih luas. Dengan memanfaatkan tradisi silaturahmi serta sumber informasi dari kalangan kerabat keluarga sendiri (M. Yusuf Karim), ia mencari penjelasan yang lebih banyak mengenai gagasan dan konsep koperasi itu. Dengan demikian proses belajar dan pembelajaran yang terjadi berlangsung dalam natural societal setting. Bentuk khas kegiatan belajarnya adalah self-directed learning.

Self-directed learning merupakan suatu proses belajar dalam mana individu mengambil inisiatif sendiri, dengan atau tanpa bantuan orang lain dalam mendiagnosis kebutuhan-kebutuhan belajarnya, memformulasikan tujuan-tujuan belajarnya, mengidentifikasi sumber-sumber material dan sumber manusiawi, memilih dan melaksanakan strategi belajar yang sesuai, dan mengevaluasi sendiri hasil belajarnya.

Dalam kasus ini H. Palessei mendiagnosis sendiri kebutuhan belajarnya. Ia memerlukan penjelasan yang lebih banyak mengenai gagasan dan konsep koperasi yang diinformasikan dan akan diaplikasikan di desa itu. Ia memformulasikan sendiri tujuan belajarnya, yaitu agar ia mengetahui prosedur pembentukannya, penyelenggaraan kegitannya, macam kegiatannya, kepengurusan dan keanggotaannya, dan sebagainya. Ia memilih sendiri sumber belajarnya, yaitu kerabat keluarga yang kebetulan bertugas di Kandepkop, yakni M. Yusuf Karim. Ia memilih dan melaksanakan sendiri strategi belajarnya yang sesuai yakni menggunakan saluran komunikasi informal antarpersonal tatap muka. Ia menilai sendiri hasil belajarnya untuk menentukan keputusannya apakah ia mengadopsi gagasan dan konsep itu atau tidak.

Tahap penerimaan atau adopsi merupakan kelanjutan dari adanya perhatian khusus terhadap gagasan dan konsep koperasi yang diinformasikan. Dari penjelasan-penjelasan yang diperolehnya pada tahap-tahap sebelumnya, H. Palessei berkesimpulan bahwa ia harus berperan aktif dan langsung dalam mendorong gerakan koperasi di desanya. Kesimpulan itu dipandang perlu agar terjamin bahwa perintis dan pendukung utama gerakan koperasi adalah orang-orang yang dapat diandalkan niat baiknya serta loyalitas dan dedikasinya.

Semboyannya pada masa pengungsian, ketika

memuncaknya gangguan keamanan oleh gerombolan Kahar Muzakkar, diaktualisasikannya kembali. Ikotu elomikko pole manre bembe, iya elokka lao ggerei bembe-e.

Makna di balik semboyan itu, ialah bahwa ia bukanlah tipe orang yang hanya mau ikut menikmati hasil jerih payah orang lain, melainkan ia justru mau bekerja untuk kepentingan orang banyak. Sebagaimana diketahui dari paparan terdahulu, H. Palessei mengangkat senjata melawan dan mengusir gerombolan pengacau dari desanya, ketika warga desanya cerai berai meninggalkan desa. Banyak yang mengungsi ke kota dan banyak pula yang pindah ke hutan dan ke gunung mengikuti perintah gerombolan. Ketika ia memutuskan menggabungkan diri ke dalam kesatuan Hansip yang dipersenjatai oleh ABRI untuk tugas operasi pengamanan wilayah, ia mendapat kritik dari kerabat keluarganya yang mengungsi ke kota. Kritik itu menyatakan, jika mengungsi ke kota itu dimaksudkan untuk mencari perlindungan dan keamanan diri, mengapa justru menggabungkan diri ke dalam kesatuan bersenjata bukan ABRI.

Ikotu elomikko pole manre bembe, iya elokka lao ggerei bembe-e, adalah jawaban yang diberikannya terhadap kritik yang ditujukan kepadanya pada waktu itu. Secara harfiah kalimat itu dapat diterjemahkan kalian itu hanya mau datang atau hadir untuk makan kambing, sedangkan saya justru mau datang untuk menyembelih kambingnya.

Kiasannya adalah ibarat pesta, yang apabila orang lain umumnya mau hadir untuk menikmati hidangan, maka ia justru mau hadir untuk mempersiapkan pesta itu. Kaitannya dengan masalah kekacauan yang menceraikan beraikan warga desa, maka jika orang-orang yang umumnya mendambakan suatu ketika dapat kembali ke kampung halamannya dalam keadaan aman, maka ia justru merasa berkewajiban dan terpanggil untuk mengangkat senjata mengusir gerombolan pengacau itu dari desanya. Dalam konteks pengembangan koperasi di desa, sebagaimana dikehendaki dengan peluncuran gagasan dan konsep koperasi itu, ia merasa terpanggil pula untuk aktif mempelopornya untuk lebih memahami konsep dan gagasan koperasi melalui self-directed learning yang dilakukannya, di samping prinsip hidup yang dianutnya, yang tergambar dalam ungkapan bahasa Bugis tersebut di atas.

Demikian sikap dan tanggapan pemimpin puncak lokal mengadopsi gagasan dan konsep koperasi yang dikomunikasikan. Sikap dan tanggapan tersebut terbentuk sebagai hasil interaksi antara konsep dirinya sebagai pribadi dan pemimpin dengan hasil belajar.

b. Tahap Perintisan Gerakan Koperasi

Perintisan gerakan koperasi dipelopori sendiri oleh pemimpin puncak lokal. Setelah menetapkan pilihan subyek sasaran, yakni kelompok elit lokal yang terdiri dari kerabat keluarganya yang tergolong pemuka masyarakat desa, ia mulai menyebarkan gagasan dan konsep koperasi

yang telah diadopsinya. Proses difusi inovasi ini menekankan komunikasi informal antarpersonal. Pendekatan yang digunakan menekankan pendekatan persuasif memanfaatkan tradisi silaturahmi.

Pada tahap awal pemimpin melakukan persuasi melalui komunikasi informal antarpersonal seorang demi seorang. Pada tahap ini proses belajar-pembelajaran dapat digolongkan ke dalam proses belajar-pembelajaran dalam formal instructional setting di satu sisi. Akan tetapi di sisi lain juga dapat digolongkan sebagai proses belajar-pembelajaran dalam natural societal setting.

Jika dilihat dari sisi pemimpin yang melakukan upaya persuasi, proses itu sifatnya terencana meskipun tidak terorganisasikan secara ketat. Oleh karena itu, dapat dipandang sebagai formal instructional learning. Tetapi jika dilihat dari sisi subyek sasaran kegiatannya pembelajaran, yakni sasaran tindakan persuasi, proses itu adalah proses interaksi sosial yang wajar. Karena itu dapat dipandang merupakan natural societal learning.

Baik sifat formal instructional learning maupun natural societal learning, upaya persuasi dari proses difusi inovasi yang dilaksanakan oleh pemimpin puncak lokal itu, bertujuan mempengaruhi wawasan, pengetahuan, sikap dan perilaku subyek yang menjadi sasaran. Dengan mempengaruhi wawasan, pengetahuan, sikap dan perilaku subyek sasaran tersebut, diharapkan agar subyek sasaran

turut mendukung kegiatan pengembangan gerakan koperasi desa.

Pada tahap selanjutnya, kegiatan difusi persuasif yang dilakukan pemimpin, tidak hanya melalui pendekatan seorang demi seorang, tetapi juga bentuk silaturahmi semacam sarasehan. Dalam bentuk kegiatan ini proses difusi persuasif dapat digolongkan sebagai formal instructional learning, karena kegiatan itu sengaja direncanakan oleh pemimpin, meskipun juga tidak diorganisasikan secara ketat. Dari sisi subyek sasaran, proses belajar yang dialaminya dari tindakan atau aktivitas difusi persuasif pimpinan itu, dapat digolongkan natural societal learning. Mereka mempersepsi silaturahmi sarasehan itu sebagai interaksi sosial yang wajar dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran mengenai adanya pesan (message) yang ditujukan kepada mereka untuk pengembangan wawasan dan pengetahuan, serta perubahan sikap dan perilakunya, muncul kemudian di dalam interaksi tersebut.

Dialog-dialog yang kemudian terjadi antara sesama subyek sasaran, dan di antara subyek sasaran dengan pemimpin, pada dasarnya juga merupakan aktivitas belajar dalam natural societal learning. Dengan demikian, perkembangan wawasan dan pengetahuan, serta perubahan sikap dan prilaku mereka adalah merupakan hasil dari natural societal learning. Dengan perkataan lain, keikutsertaan mereka dalam upaya pengembangan gerakan

koperasi yang diprakarsai oleh pemimpin, bahkan kemudian mereka menjadi kelompok perintis gerakan tersebut, adalah merupakan hasil natural societal learning. Mereka saling bertukar informasi dan pandangan melalui komunikasi informal, bahkan lebih bersifat insidental dalam perjumpaan yang tidak direncanakan. Perkembangan wawasan, pengetahuan, dan aspirasi mereka berkenaan dengan ide koperasi pedesaan tersebut terjadi sebagai akibat dari komunikasi informal dan insidental tersebut.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam proses belajar-pembelajaran, pada tahap perintisan gerakan koperasi ini, pemimpin memainkan peranan sebagai agen perubahan (agent of change). Ia mengadopsi gagasan dan konsep koperasi itu pertama kali, kemudian ia mendifusikan gagasan dan konsep tersebut, mula-mula kepada orang-orang tertentu yang dipilihnya, kemudian kepada kalangan yang lebih luas.

Dalam memainkan peranan sebagai agen pembaharu tersebut, pemimpin merupakan motivator dan sumber dinamika kegiatan kelompok perintis. Dengan pendekatan persuasif, ia menumbuhkan kesadaran dan mendorong kemauan subyek sasaran difusi untuk menyerap ide dan konsep koperasi. Dengan daya kharismaniknya, ia mendorong upaya perintisan gerakan koperasi, dalam mana subyek dan/atau kelompok subyek sasaran difusi tersebut terlibat sebagai pelaku utama.

Upaya memotivasi dan mendinamisasi subyek sasaran

dan/atau kelompok subyek sasaran difusi tersebut tidak dilakukan oleh pemimpin dengan menginstruksikan pelaksanaan perintisan gerakan koperasi itu. Melainkan melalui upaya pembelajaran yang berfungsi mengembangkan wawasan, pengetahuan, dan aspirasi subyek sasaran difusi, mengenai ide serta konsep koperasi. Kegiatannya, seperti telah dikemukakan terdahulu, ialah berupa pemberian informasi melalui komunikasi informal antarpersonal, baik secara individual sebagaimana pada awalnya, maupun secara kelompok.

Kegiatan yang demikian dilakukan berulang kali secara sabar dengan menekankan pendekatan persuasif, mengupayakan tumbuhnya kesadaran pada diri subyek sasaran mengenai pentingnya usaha peningkatan kesejahteraan warga desa. Dan bahwa koperasi pedesaan merupakan wahana kerja sama untuk tujuan tersebut.

Upaya penyadaran atau concientization menurut istilah yang berasal dari Paulo Friere, dilakukan oleh pemimpin dengan cara, antara lain, (1) mempengaruhi opini subyek sasaran difusi bahwa turut memikirkan kesejahteraan orang banyak adalah suatu hal yang luhur, dan bahwa bekerja untuk kesejahteraan orang banyak adalah suatu kehormatan; (2) mereaktualisasikan etika moral tradisional simpatuo sipatokkong untuk membenarkan (justify) opini tersebut; (3) memotivasi subyek sasaran difusi bahwa mereka sebagai suatu bagian kecil dari

kelompok elit lokal, yang merupakan suatu rumpun kerabat keluarga yang terpandang di desa, berkewajiban moral melestarikan status kehormatan itu dengan amal bakti bagi kesejahteraan orang banyak.

Konsep penyadaran atau concientization merupakan konsep dasar PLS dari Paulo Freire sebagai terapi terhadap keterbelakangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya pemimpin mendorong, dan menggerakkan koperasi pedesaan, berawal sebagai upaya pendidikan, bukannya terutama sebagai upaya politik yang mengandalkan pendekatan kekuasaan (power) dan/atau upaya ekonomik yang mengandalkan modal. Pendekatan pilitik dan pendekatan ekonomik berfungsi sebagai penunjang terutama pada tahap pengembangan lebih lanjut dari gerakan koperasi.

Kegiatan difusi persuasif yang dilakukan pemimpin, yang dalam hal ini diidentifikasi sebagai upaya pendidikan, berwujud upaya pembelajaran. Tujuannya ialah mengembangkan wawasan, persepsi, dan aspirasi subyek sasaran. Sebagai upaya pembelajaran, adakalanya diperlukan raga belajar, yakni suatu hal, peristiwa, atau keadaan yang dapat digunakan untuk memperkuat intensitas belajar-pembelajaan.

Citra negatif koperasi dan sikap skeptis masyarakat, yang pada dasarnya berpotensi sebagai kendala, oleh pemimpin secara kreatif dimanipulasikan menjadi raga belajar. Kedua hal tersebut ditempatkan dalam konteks

nilai budaya lokal siri, sehingga menjadi tantangan yang tidak boleh dihindari oleh seseorang yang memiliki martabat atau harga diri, to enka sirina. Oleh karena hal tersebut dipersepsi sebagai tantangan yang harus dihadapi, maka fungsinya menjadi motivasi yang memperkuat intensitas pembelajaran.

c. Tahap Pengembangan Gerakan Koperasi

Pada tahap pengembangan gerakan koperasi, upaya difusi persuasif menggunakan, baik komunikasi formal massal dan kelompok, maupun komunikasi informal antar-personal. Dalam pada itu aktivitas difusi persuasif tidak lagi dilakukan oleh pemimpin puncak lokal sendiri saja. Dalam hal ini kelompok perintis telah merupakan penyelenggara kegiatan pengembangan gerakan koperasi. Individu-individu anggota kelompok perintis yang semula merupakan subyek sasaran persuasi, kini menjadi subyek pelaksana upaya persuasi.

Terlihat pada tahap ini upaya persuasi sebagai upaya pelajaran berlangsung baik dalam formal instructional setting maupun dalam natural societal setting. Komunikasi formal secara massal dan dalam kelompok untuk mengembangkan wawasan, persepsi dan aspirasi warga masyarakat desa berkenaan dengan ide dan praktek koperasi dapat diidentifikasi sebagai bentuk kegiatan belajar-pembelajaran formal instructional learning. Kegiatan yang dilaksanakan dalam hal ini

dirancang dan diselenggarakan secara terorganisasi meskipun tidak terlalu ketat oleh kelompok perintis, yang juga sudah menjadi penyelenggara koperasi desa. Sedangkan komunikasi informal antar personal yang lebih sering bersifat insidental, dapat diidentifikasi sebagai natural societal learning.

Bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran formal instructional learning berupa penyuluhan massal di mesjid-mesjid, dan penyuluhan kelompok-kelompok khusus. Penyuluhan terhadap kelompok tani biasanya diadakan menjelang musim tanam dan menjelang musim panen, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Terhadap kelompok perintis sendiri, bentuk pelajarannya adalah penyuluhan dan pelatihan teknis pengelolaan koperasi, keterampilan administrasi, dan pengembangan wawasan serta kecakapan kewiraswastaan. Sedangkan terhadap kelompok pendukung, bentuk kegiatan pembelajarannya berupa penyuluhan perkoperasian umumnya, khususnya masalah pengelolaan produksi, pemasaran, perkreditan, serta pengembangan kewiraswastaan. Dalam pada itu ditingkat massa pedesaan yang telah terjangkau oleh aktivitas pengembangan gerakan koperasi, timbul berbagai kebutuhan belajar-pembelajaran sebagai dampak dari transaksi yang mereka lakukan dengan gerakan koperasi desa.

Sebagaimana diketahui koperasi adalah lembaga yang berorientasi pelayanan (service oriented), sedangkan

kalangan massa pedesaan cenderung haus akan pelayanan. Dalam kenyataan yang demikian maka keterlibatan massa rakyat pedesaan dalam kiprah koperasi adalah terutama keterlibatan sebagai penerima layanan.

Melalui keterlibatan pelayanan seperti dikemukakan di atas, timbulnya berbagai jenis kebutuhan belajar-pembelajaran tersebut, meliputi hal-hal seperti dikemukakan di bawah ini.

- (1) Masalah konsep dan praktek mengenai kedudukan anggota dan bukan anggota dalam hubungan pelayanan koperasi desa.
- (2) Masalah konsep dan praktek mengenai kedudukan, hak dan kewajiban anggota sebagai pemilik pelanggan koperasi.
- (3) Masalah konsep dan praktek mengenai jasa anggota dalam setiap transaksinya dengan koperasi.
- (4) Masalah konsep dan praktek mengenai sisa hasil usaha atau SHU, perhitungan, dan pembagiannya.
- (5) Masalah prosedur perkreditan, simpan pinjam, dan lain sebagainya.

Kenyataan menunjukkan bahwa bagi kebanyakan massa pedesaan, pengetahuan mengenai konsep-konsep dan kecakapan praktis yang berkaitan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, lebih banyak diperoleh melalui natural societal learning. Secara lebih khusus, dapat dikatakan bahwa

berbagai pengetahuan dan kecakapan tersebut diperoleh melalui experiential learning dan learning within dyad and group setting.

Setting dyad dan group sebagai ajang belajar-pembelajaran bagi warga masyarakat lapisan bawah, merupakan sesuatu yang sangat lazim dan sangat wajar, sehingga lebih sering luput dari perhatian atau bahkan dipandang tidak termasuk dalam kawasan konsep dan teori pendidikan. Setting dyad dan group ini selalu ada di dalam kehidupan bersama manusia, di mana pun dan kapan pun. Pada lokasi penelitian ini dan berkaitan dengan kasus ini, setting dyad dan Informal small group termasuk misalnya pada kerumunan (crowd) sejumlah orang bertetangga, yang bersama-sama memirsakan televisi, saat mandi bersama di sungai, ketika menghabiskan waktu senggang di beranda rumah bersama tetangga dekat, pada saat bersama-sama menunggu waktu shalat maghrib di beranda mesjid, dan lain sebagainya.

Bagi para penyelenggara kegiatan koperasi, seperti pengurus, anggota badan pemeriksa, manajer, dan karyawan, bentuk kegiatan belajar-pembelajarannya lebih bersifat formal instructional learning di samping saling belajar dan membelajarkan di antara sesama melalui peer dyad learning. Bentuk kegiatan belajar pembelajaran dalam setting formal instruction bagi mereka, antara lain berupa: penataran, pelatihan, dan lokakarya dalam berbagai

bidang khusus yang berkaitan dengan penyelenggaraan koperasi. Berbagai bidang pelatihan, penataran, dan lokakarya tersebut, antara lain ialah sebagaimana telah dikemukakan di bawah ini.

- (1) Kursus anggota inti koperasi
- (2) Penataran penyuluhan koperasi
- (3) Latihan kerja koperasi antarpropinsi
- (4) Kursus manajemen koperasi
- (5) Kursus tata buku dan kursus akuntansi
- (6) Seminar dan lokakarya perkreditan
- (7) Seminar dan lokakarya pasca panen
- (8) Kursus petugas teknis koperasi
- (9) kursus-kursus mengenai sarana produksi padi (saprodi), sarana produksi pertanian (sapro-tan), operator ice milling unit dan lain-lain jenis.

Keterampilan yang dibutuhkan sesuai dengan tingkat perkembangan koperasi.

Bagi para karyawan, di samping jenis pelatihan dan lokakarya tersebut menurut bidang tugasnya, aktivitas pembelajaran lain yang dibutuhkan, di antaranya ialah achievement motivation training.

Berbagai bentuk kegiatan pembelajaran yang disebut di atas sudah barang tentu tidak mudah memenuhinya di desa, melainkan melalui kerja sama dengan lembaga lain. Pada koperasi pedesaan kasus penelitian ini, semua jenis

pelatihan, lokakarya dan kursus tersebut telah pernah diikuti oleh para penyelenggara koperasi menurut bidangnya masing-masing, dengan bantuan Diklat Koperasi dan Kantor Departemen Koperasi serta Kantor Departemen Tenaga kerja setempat.

Dalam pada itu apabila pendidikan diartikan pula sebagai pemeliharaan norma dan pengembangan nilai-nilai di samping pengembangan wawasan, pengetahuan, dan ketrampilan, maka seyogianya pembinaan mental keagamaan dapat diintegrasikan pula di dalam pengembangan gerakan koperasi. Masjid merupakan salah satu institusi sosial dalam kehidupan komunitas pedesaan. Di lokasi penelitian ini beranda masjid merupakan sarana pertemuan umum informal yang bersifat wajar dan spontan. Sebagaimana dikemukakan di atas, sarana ini seringkali menjadi ajang saling belajar dan membelajarkan.

E. Pergeseran Pola Kepemimpinan Koperasi Pedesaan

1. Kepemimpinan Periode Perintisan dan Pengembangan Gerakan Koperasi

a. Profil Pemimpin Periode Perintisan

Telah dipaparkan pada bagian terdahulu mengenai karakteristik kepribadian H. Palessei, kepala desa Bontosunggu. Dalam pandangan warga desanya, ia adalah seorang tokoh toriasiri. Istilah toriasiri jika

diterjemahkan secara harfiah berarti orang yang dimalui, disegani, dihormati, atau dipatuhi. Atau dapat diterjemahkan sebagai seseorang, yang orang lain masiri (malu, segan, hormat, patuh) kepadanya. Sikap segan dan hormat serta patuh terhadap toriasiri tersebut didasarkan atas citranya yang selalu berpegang teguh kepada nilai-nilai luhur, seperti kebajikan, kebenaran, keberanian yang rendah hati, sikap adil, tanggung jawab dan sebagainya. Oleh karena itu, sikap hormat, segan dan patuh terhadap toriasiri itu sifatnya murni, tulus, dan ikhlas, yakni tidak terkait dengan status formal tertentu seperti pangkat, jabatan atau kekayaan.

Citra kepribadian yang demikian terbentuk melalui proses yang panjang dalam kehidupan seseorang. Bukan merupakan hasil dari perbuatan atau tindakan sesaat dan/atau kebetulan. Sifat-sifat luhur itu muncul secara ajeg dalam sikap dan perilaku seorang toriasiri.

Citra sebagai tokoh toriasiri pada diri kepala desa, pemimpin puncak lokal di Bontosunggu itu terbentuk dalam persepsi orang-orang di sekitarnya melalui performance yang diragakan H. Palessei dalam kehidupannya sehari-hari, semenjak masa muda hingga masa tua. Dengan perkataan lain, riwayat hidupnya diwarnai dengan perilaku-perilaku yang mencerminkan pekerti yang luhur dalam pandangan orang-orang di sekitarnya. Beberapa hal berkenaan dengan itu telah disinggung dalam paparan

sebelum ini.

Semenjak usia sangat muda Palessei telah dikenal dekat oleh para pamong di desanya sebagai pemuda yang selalu bersikap sopan dan suka membantu. Pekerjaan apa saja, baik yang ada kaitannya dengan tugas-tugas di Balai Desa, maupun dalam kehidupan sehari-hari, ia sering dimintai bantuan. Sikap sopan dan rendah hatinya itu juga sudah dikenal oleh orang-orang sekampungnya sejak masa muda.

Bagi warga desa Bontosunggu yang pernah mengalami kepahitan hidup masa pergolakan dan kekacauan dalam dasawarsa 50-an hingga 60-an akibat pemberontakan DI/TII keberanian H. Palessei sudah bersifat legendaris. Sedangkan bagi umumnya warga desa termasuk yang berusia lebih muda, H. Palessei terkesan sebagai tokoh pejabat dan pribadi yang terbuka, rendah hati, bersahaja, jujur dan solidaritas sosialnya tinggi. Akan tetapi, di samping itu ia juga dikenal dengan tindakan tegas dan kerasnya. Suatu peristiwa yang menjadi buah bibir mengenai hal ini ialah ketika ia memukul seorang warga yang kedapatan olehnya tidak ikut bekerja bakti tanpa suatu alasan yang berarti.

b. Kepemimpinan Perintis dan Pengembangan Gerakan Koperasi.

Seorang pemimpin perintis dan pengembang gerakan, logikanya adalah seseorang yang memiliki semangat pelopor

atau perintis. H. Palessei memiliki kualitas tersebut sebagaimana tersirat dalam ungkapan filosofisnya; Ikotu elokmikko pole manre bembek. Iaya elokkaha lao qgere'i bembek-e, sebagaimana telah dijelaskan terdahulu.

Seorang pelopor atau perintis senantiasa menempatkan dirinya pada posisi terdepan bila ada masalah, kesulitan, atau bahkan ancaman yang harus dihadapi bersama. Sifat kepeloporan dan perintisan yang merupakan makna di balik ungkapan filosofisnya tersebut di atas, telah acapkali dibuktikannya. Ketika orang lain mengungsi meninggalkan desanya, ia justru menyusun kekuatan bersenjata untuk kembali ke desa mengusir gerombolan pengacau. Ketika citra koperasi sangat tidak menguntungkan dan sikap masyarakat mencerminkan skeptisisme itu pulalah, ia mengadopsi suatu gagasan dan konsep koperasi yang hendak diaplikasikan di pedesaan.

Dengan profil sebagai pribadi toriasiri itu, maka pada dasarnya H. Palessei merupakan pemimpin informal dalam komunitasnya. Sebagai pemimpin informal, ia merupakan panutan bagi warga komunitasnya.

Dalam pada itu kedudukan sebagai kepala desa menempatkannya sebagai pemimpin formal bagi warga desanya. Sebagai pemimpin formal ia memiliki kewenangan dalam penentuan pengambilan keputusan dan kebijakan yang menyangkut kehidupan warga desanya, baik di bidang politik, sosial, budaya, maupun ekonomi dan pertahanan

keamanan.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat dikatakan pemimpin formal dan informal di Bontosunggu menyatu pada diri H. Palessei, sebagai pemimpin puncak lokal. Oleh karena itu terdapat kecenderungan yang kuat, bahwa kebijakan dan keputusannya dipatuhi, prakarsa dan inisiatifnya didukung. Begitu juga motivasi dan persuasinya terhadap warga desanya bagi upaya pengembangan gerakan koperasi cenderung efektif.

Kapasitasnya, sebagai pemimpin formal dan pemimpin informal dan/atau sebagai panutan, sangat menunjang peranannya sebagai opinion leader. Sebagai opinion leader, ia mempunyai kecakapan mempengaruhi orang lain secara baik, informal, serta ajeg (continue).

Upaya pengembangan gerakan koperasi merupakan dukungan, kerja sama, dan solidaritas. Ia tidak dapat diperintahkan atau diinstruksikan oleh suatu sistem kekuasaan, kemudian diharapkan akan berjalan dengan sendirinya. Dalam pada itu dukungan, kerja sama, serta solidaritas itu, juga tidak dengan sendirinya ada melainkan harus diupayakan.

Merintis upaya pengembangan gerakan koperasi, terlebih dahulu dalam masyarakat pedesaan yang bersikap skeptis di mana citra koperasi bersifat negatif, dengan sendirinya memerlukan kemampuan yang lebih besar dari seorang pemimpin untuk mendapatkan dukungan dan

solidaritas itu. Oleh karena itu, pola kepemimpinan yang diperlukan ialah terutama pola kepemimpinan solidarity makex. Pemimpin yang memiliki ciri yang demikian boleh jadi kurang memiliki profesionalitas, namun yang lebih penting ia menjadi panutan massa. Lagi pula untuk memotivasi dan mendinamisasikan kelompok pendukung, acapkali lebih diperlukan kiat yang lebih menyentuh emosi pendukung ketimbang kiat yang rasional.

2. Kepemimpinan Periode Pengembangan Kelembaga Koperasi

Obyek penelitian kasus ini, sebagaimana telah dikemukakan, adalah KUD Mattirobulu yang berkedudukan di desa Bontosunggu. Pada saat berlangsungnya penelitian ini, KUD tersebut berkualifikasi sebagai KUD kelas A, yang sifatnya mandiri. Berbagai jenis kredit yang dikelolanya, hingga saat penelitian ini tidak pernah tertunggak angsuran pengembaliannya. Bahkan pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, meminta KUD ini membantu pelunasan pembayaran angsuran kredit KUT beberapa KUD di Bontosunggu Timur, sebesar Rp 80.000.000,00. Selain itu, Bupati juga meminta KUD ini melayani kredit KUT untuk Kecamatan Ujungbulu, Bontobahari dan Bontotiro, selain untuk wilayah kerjanya sendiri di desa Bontosunggu, Bialo dan Palambara-e. Dengan jumlah unit usaha sebanyak 21 buah, maka secara praktis KUD Mattirobulu menjadi badan usaha paling terkemuka di kabupaten Bulukumba.

a. Profil Pemimpin Pengembangan Kelembagaan
Koperasi

Pengembangan gerakan koperasi di Bontosunggu, yang dimulai tahun 1973, mulai memasuki tahap pembinaan dan pengembangannya sebagai lembaga koperasi pada tahun 1975. Eksistensi kelembagaan koperasi pedesaan dikukuhkan dengan status sebagai badan hukum dengan nomor: 3522/BH/IV/75 tanggal 25 Pebruari 1975. Sebagai merek dagang (trade mark) digunakanlah nama Mattirobulu. Nama tersebut dapat diterjemahkan secara harfiah, yaitu menatap bukit atau gunung.

Jika pada periode perintisan gerakan, tokoh pusat (central figure) adalah H. Palessei, kepala desa Bontosunggu, maka pada periode pengembangan kelembagaan koperasi ini, tokoh yang paling dominan adalah H. Abdullah Karim, manajer KUD Mattirobulu dan menantu H. Palessei.

H. Abdullah Karim termasuk anggota kelompok perintis yang paling muda di samping Ibnu Hajar. Pada saat gerakan koperasi dilancarkan oleh mertuanya, ia baru berusia 26 tahun dan bekerja sebagai pengusaha muda di Bulukumba. Pendidikan formal yang sempat dialaminya hanya sampai kelas tiga SMA. Ia mengalami putus sekolah (drop out) karena menikah dalam usia muda dengan teman sekolahnya, anak kandung H. Palessei. Sejak mengalami putus sekolah itu, ia magang pada orang tuanya, seorang pengusaha pribumi yang berhasil.

Bidang usaha yang ditekuni orang tuanya ialah perdagangan hasil produksi pertanian, seperti beras, kacang tanah, jagung. Hasil-hasil pertanian tersebut dibeli dari petani kemudian dijual ke Ujungpandang dan Surabaya. Untuk pengangkutan barang tersebut ia menggunakan tiga buah perahu layar motor (PLM) jenis pinisi kepunyaan sendiri. Dari Surabaya perahu tersebut mengangkut berbagai barang kebutuhan sehari-hari, bahan bangunan, dan lain-lain untuk pasaran lokal.

Dari pengalaman magang pada orang tuanya itu berangsur-angsur H. Abdullah Karim berusaha secara mandiri. Di samping memperdagangkan barang kebutuhan sehari-hari di Bulukumba, ia juga mengusahakan truk angkutan barang.

Beberapa ciri yang menonjolkan kepribadian H. Abdullah Karim dalam persepsi orang-orang yang mengenalnya secara dekat, antara lain ialah disiplin dirinya yang tinggi, keteguhannya berpegang pada prinsip yang dianutnya, ketekunan kerjanya, dan kreativitasnya. Selain itu ia juga dikenal mampu mengambil keputusan dengan cepat serta berani menanggung risiko.

Contoh kreativitasnya, seperti telah dikemukakan terdahulu, ialah upayanya memperpanjang usia kerja mesin gilingan beras di Bontosunggu. Usia kerja maksimum mesin itu secara normal adalah lima tahun. Atas rencananya sendiri ia menyuruh perajin bengkel di Ujungpandang membuat suku cadang yang sesuai dengan mesin tersebut.

Pada saat mesin-mesin giling yang lain telah menjadi besi tua di desa, mesin giling huller yang dioperasikan oleh BUUD/KUD desa Bontosunggu masih bekerja dengan baik pada usia lebih delapan tahun.

Ketekunannya bekerja dengan disiplin diri yang tinggi, menjadikan ia dikenal sebagai pekerja keras. Ia mempunyai semboyan: uang adalah modal tetapi waktu juga adalah modal. Oleh karena itu, menurut dia, menghabiskan waktu secara tidak produktif berarti menghabiskan modal. Berdasarkan prinsip tersebut, maka untuk mengantisipasi peluang bisnis pada hari berikutnya, ia mau bekerja keras hari ini. Agaknya atas dasar itu ia tampak kurang antusias terhadap permintaan kesempatan wawancara dengan peneliti. Setelah beberapa kali permintaan bertemu diajukan, baru dapat dilayani. Pertemuan yang pertama berlangsung sore hari dalam suasana yang kurang menguntungkan untuk kepentingan wawancara. Hilir mudik para pekerja untuk berbagai kesibukan di ruang kerjanya yang merupakan bagian dari ruang tamu di rumahnya terasa sangat mengganggu. Atas saran yang diajukannya kepada peneliti, maka pertemuan berikutnya berlangsung mulai pukul 22.00. Memang suasana rumahnya sudah lebih tenang, tetapi belum berarti bahwa pekerjaannya telah berakhir untuk hari itu. Justeru pada saat yang demikian ia baru mulai menerima laporan sopir-sopir angkutan penumpang untuk trayek Bulukumba-Ujungpandang pulang pergi, yang baru tiba dari Ujungpandang.

Kecepatannya mengambil keputusan, sebagaimana terkesan karyawannya dan mitra kerjanya, didasarkannya pada nasihat orang tuanya. Nasihat itu mengatakan, narekko purani mutimbang madeceng-deceng gau-e muappesona lao ri puangnge, tennianatu issemmu. Maksudnya apabila engkau telah memikirkan masak-masak sesuatu tindakan yang akan engkau putuskan, kemudian engkau berserah diri kepada Tuhan, maka tidak perlu kau pikirkan lagi risikonya. Hanya Tuhan sajalah yang tahu apa yang akan terjadi.

Keberaniannya mengambil risiko pernah membuat rekan-rekannya resah. Pada tahun 1988, ia memutuskan memenuhi permintaan kiriman beras sebanyak 300 ton dari seorang pengusaha Cina di Semarang, yang dikenalnya hanya sepiintas dalam perjalanan Surabaya-Jakarta. Permintaan tersebut hanya disampaikan ke Bulukumba melalui tilpon interlokal. Satu-satunya petunjuk untuk mempercayai niat baik pengusaha Semarang tersebut ialah nomor rekening BRI yang disebutkannya melalui komunikasi-lisan jarak jauh tersebut. Pada saat itu KUD Mattirobulu telah menguasai beras sebanyak itu, akan tetapi beras tersebut disiapkan untuk stock nasional melalui Dolog. Keputusan mengirim beras tersebut ke Semarang didasarkan atas perhitungan, bahwa KUD Mattirobulu mampu dengan cepat memenuhi stock nasional tersebut melalui pembelian beras di desa-desa lain, dengan mengerahkan armada angkutan (truk) yang dimiliki. Sementara penjualan beras ke Semarang tanpa pembayaran lebih dahulu itu, diyakininya akan berjalan

lancar dengan keuntungan yang cukup baik. Pada akhirnya memang ternyata perhitungannya tidak meleset.

A. Azis Sinrang, seorang pejabat pada Kondepkop Bulukumba menceritakan keberanian H. Abdullah Karim bertindak dalam arena bisnis. PT Balianda yang mengelola proyek perumahan dengan biaya Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dari Bank Tabungan Negara, yang membangun 50 unit rumah di desa Paenre Lompoe, tidak mampu melanjutkan kegiatannya. Proyek tersebut telah ditawarkan ke perusahaan lain tetapi belum ada yang berani melanjutkannya. Akhirnya, H. Abdullah Karim memutuskan mengambil alih kelanjutan pengelolaan proyek tersebut atas nama KUD Mattirobulu. Dalam waktu singkat ia berhasil memasarkan 29 dari 50 unit rumah tersebut kepada anggota dan karyawan KUD ini, dan dalam waktu singkat berikutnya 9 unit dapat dipasarkannya lagi.

Komitmennya terhadap nilai kedisiplinan menjadi bahan cerita tersendiri di kalangan karyawannya, ketika ia memberhentikan Salahuddin Karim, adik kandungnya sendiri sebagai asisten manajer karena yang bersangkutan tidak dapat mempertanggungjawabkan sejumlah uang KUD, setelah diberi peringatan sebelumnya. Tindakannya itu mendapat penyesalan dari orang tua mereka dengan alasan dilakukan terlalu tergesa-gesa. Akan tetapi H. Abdullah Karim berpegang pada prinsip bahwa adiknya harus diberi pelajaran agar ia lebih dewasa dan lebih hati-hati meniti karier kehidupan dan okupasinya. Selain itu, ia mengacu

kepada prinsip melindungi kepentingan orang banyak, meskipun terpaksa mengorbankan satu orang, adalah hal yang lebih utama. Ia juga berharap dari tindakannya itu dapat menjadi benih tumbuhnya tradisi kejujuran dan kedisiplinan bagi para penyelenggara kegiatan koperasi, baik pengurus maupun karyawan. Sedangkan yang juga dipandang sangat penting ialah menjaga citra KUD Mattirobulu di mata anggotanya.

A. Aziz Sinrang, seorang pejabat Kandepkop yang merasa sudah akrab dengan H. Abdullah Karim, menyatakan kepada peneliti bahwa sepengetahuannya memang reputasi yang baik di mata khalayak dan simpati masyarakat merupakan urutan pertama pentingnya dibandingkan dengan keuntungan materi dalam pandangan hidup H. Abdullah Karim.

b. Kepemimpinan Pengembangan Kelembagaan Koperasi

Dalam periode pengembangan kelembagaan koperasi, semenjak pengukuhan status badan hukum KUD Mattirobulu, posisi H. Abdullah Karim dalam kehidupannya sebagai manajer secara perangsur-angsur menjadi makin dominan. Tokoh pusat (central figure) yang semula diperankan oleh kepala desa, H. Palessei berangsur-angsur bergeser kepada manajer H. Abdullah Karim. Kedudukannya secara historis memang kuat karena ia termasuk salah seorang di antara anggota kelompok perintis pengembangan gerakan koperasi di desa Bontosunggu itu, yang kemudian melahirkan kelembagaan KUD Mattirobulu tersebut. Secara sosial-

psikologis juga ia ikut karena ia adalah menantu kepala desa, tokoh toriasiri yang menjadi panutan warga desa Bontosunggu. Akan tetapi, yang lebih penting lagi, dominasinya dalam pengembangan kelembagaan KUD adalah merupakan produk dari integritas kepribadiannya serta kepiawaian bisnisnya dan kecakapan manajerialnya. Pernah beberapa tahun berselang pemerintah menempatkan seorang manajer koperasi lulusan Akademi Koperasi sebagai pegawai negeri yang diperbantukan pada KUD Mattirobulu. Akan tetapi, pegawai tersebut tidak mampu menyesuaikan diri dengan sepak terjang dan irama kerja manajer yang sudah ada. Oleh karena itu, pemerintah (Kondepkop) mengalihkan pegawai tersebut ke lingkungan Kondepkop Bulukumba.

Dalam Rapat Bulanan KUD Mattirobulu tanggal 16 September 1989, yang peneliti hadiri, kesan dominasi manajer terlihat nyata. Suatu usulan dari salah seorang pengurus agar KUD membeli sebuah mobil khusus untuk keperluan pengurus, serta merta ditolak oleh manajer. Alasan penolakan itu ialah bahwa kepentingan pengadaan mobil khusus untuk pengurus belum cukup mendesak. Sedangkan biaya operasional sebuah mobil termasuk perawatannya cukup banyak, sehingga tidak sejalan dengan asas efisiensi. Selanjutnya usulan tersebut tidak menjadi perbincangan lagi di dalam rapat tersebut.

Kepemimpinan, dalam arti kemampuan mempengaruhi dan mendorong orang lain untuk menyetujui dan menerima cara bersikap dan bertindak yang dikehendaki pemimpin, yang

diragakan H. Abdullah Karim sebagaimana terlihat dalam berbagai kebijakan dan tindakannya tersebut di atas, tampak mengacu kepada azas rasionalitas, efektifitas, dan efisiensi. Pertimbangan keputusan dan kebijakan-kebijakannya tampak sejalan dengan prinsip-prinsip business like, seperti rasional, efektif, dan efisien, serta produktif.

Rasionalitas dalam kepemimpinan yang bertumpu pada prinsip business like, acapkali menghendaki sikap dan tindakan lugas. Tindakan lugas dari pemimpin acapkali bersifat impersonal sehingga tidak semua pemimpin (di Indonesia) mampu melakukannya. Hal yang demikian tidak terjadi pada diri H. Abdullah Karim. Ia mampu bersikap dan bertindak lugas demi kepentingan lembaga, sebagaimana dibuktikannya ketika terpaksa memecat saudaranya sebagai asisten manajer KUD Mattirobulu. Sikap dan tindakan yang demikian pernah dilakukannya terhadap seorang pengemudi truck milik KUD Mattirobulu yang ketahuan seringkali mengurangi jatah BBM untuk kendaraan yang dikuasakan kepadanya, untuk kepentingan lain.

Meskipun manajer ini tampak dominan dalam periode pengembangan institusi koperasi, namun dalam memimpin sebanyak 50 orang karyawan KUD Mattirobulu, ia juga mampu bersikap demokratis. Dalam hal penentuan jadwal kegiatan kerja harian para karyawan tersebut, ia menyerahkan pengaturan sepenuhnya kepada musyawarah di antara mereka sendiri. Ketentuan tersebut meliputi jam kerja setiap hari, pakaian seragam kantor, apel bendera, dan

segainya, sepenuhnya merupakan hasil musyawarah para karyawan sendiri, yang kemudian mendapatkan pengesahan dari manajer. Akan tetapi, di dalam hal aplikasinya, ia menuntut ketaatan terhadap keputusan bersama tersebut.

Pada dasarnya secara normatif kepemimpinan pada suatu institusi koperasi dibedakan atas kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan usaha. Kepemimpinan organisasi koperasi berada di tangan pengurus, sedangkan kepemimpinan usaha (bisnis) berada di tangan manajer yang membawahi secara langsung semua karyawan. Penguruslah yang mengangkat atau memberhentikan manajer, mengambil keputusan, dan menetapkan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh manajer dan karyawan. Oleh karena itu, terasa sebagai suatu kegagalan apabila manajer tampak lebih menentukan dari pada pengurus dalam menentukan jalannya koperasi. Akan tetapi, di dalam realitas dunia bisnis yang seringkali memerlukan kecepatan dan ketepatan mengambil keputusan dan menentukan langkah, tentulah tidak selayaknya membatasi keleluasaan manajer dalam hal itu. Berkaitan dengan tata hubungan kerja itu, KUD Mattirobulu tampak unik, sebab manajer dan semua karyawan adalah juga anggota. Bahkan manajer adalah salah seorang dari kelompok perintis pengembangan gerakan koperasi yang pada akhirnya melahirkan institusi KUD itu. Bahwa selama ini tidak pernah terjadi perbedaan visi dan perbenturan kepentingan antara pengurus dan manajer, yang sebagaimana dikatakan tampak dominan tersebut, adalah merupakan suatu realitas yang mengandung makna tersendiri.